

BUKU

2

PANDUAN PRBBK

Pendekatan PRBBK di Indonesia



SIAP SIAGA
Australia - Indonesia Partnership
for Disaster Risk Management



PANDUAN

PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK)

BUKU

2

PENDEKATAN PRBBK

Editor Ahli :
Eko Teguh Paripurno dan Petrasa Wacana

Penyusun/Kontributor
Eko Teguh Paripurno, Indah Putri, Dewi Novirianti, Petrasa Wacana, Fredy Chandra dan Sumino, Nihil Miftahul Jannah, Untung Tri Winarso

Editor Bahasa : Petrasa Wacana

Panduan ini diupdate dan disusun ulang oleh MPBI dalam versi Bahasa Indonesia dengan dukungan BNPB, Siap Siaga, PSMB UPN, LPTP Solo. 2022.



SIAP SIAGA
Australia - Indonesia Partnership
for Disaster Risk Management



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
1 Tantangan Kemandirian, Keberlanjutan dan Perluasan PRBBK	1
1.1 Pengantar	1
1.2 Refleksi Gerakan PRBBK di Indonesia	1
2 Pendekatan Integratif PRBBK di Indonesia	10
2.1 Prinsip dan Nilai PRBBK	10
2.2 Integrasi PRBBK dan Adaptasi Perubahan Iklim	11
2.3 Perlindungan Sosial Adaptif Komunitas	15
3 Sistem Peringatan Dini Terpadu Berpusat Pada Masyarakat	25
3.1 Sistem Peringatan Dini Berpusat Pada Masyarakat	25
3.2 Sistem Peringatan Dini Berbasis Komunitas	26
3.3 Dasar dan Prinsip Peringatan Dini Berbasis Komunitas	27
3.2.2 Isu-isu Penting	28
4 PRBBK yang Inklusif	32
4.1 Gender dan Inklusi Dalam PRBBK	32
4.2 Pengarusutamaan Gender dalam PRBBK	37
4.3 Kelompok Lansia dan Penyandang Disabilitas dalam PRBBK	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Konsep <i>Climate Smart Disaster Risk Management</i> (CSDRM) Sumber : Modifikasi dari Mitchell et al. (2010)	13
Gambar 2.2	Rumusan risiko iklim hubungan antara ancaman, kerentanan dan keterpaparan (Sumber : IPCC, 2014)	14
Gambar 2.3	Kerangka Resiliensi dan Ekonomi Berkelanjutan (Pateur et al., 2011)	18
Gambar 2.4	Kerangka Perlindungan Sosial Adaptive (<i>Arnall et al., 2010 modified from Davies et al., 2009</i>)	19
Gambar 2.5	Kerangka Konseptual Ketangguhan Bencana Masyarakat Berbasis Kesejahteraan (Forum Kolaborasi K/L., 2022)	20
Gambar 3.1	Elemen Sistem Peringatan Dini Terpadu dan Berbasis Masyarakat	26
Gambar 3.2	Ringkasan Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Komunitas	31
Gambar 4.1	Skema PRBBK yang Inklusi Gender	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kegiatan Kunci API-PRB Daftar kategori dan indicator kegiatan pada API-PRB yang tidak bersinggungan dengan ERSL	21
Tabel 2.2	Integrasi Kegiatan API-PRB dan ERSL : Daftar kategori dan indicator kegiatan API-PRB yang bersinggungan dnegan ERSL	21
Tabel 2.3	Integrasi Kegiatan API-PRB dan ASP : Daftar indicator kunci API-PRB yang bersinggungan dengan indicator ASP	22
Tabel 2.4	Kegiatan Kunci Ketahan Ekonomi dan Mata Pencaharian Berkelanjutan	23
Tabel 2.5	Kegiatan Integratif ERSL dan ASP	23
Tabel 2.6	Kegiatan Kunci Proteksi Sosial	24
Tabel 2.7	PRBBK tradisional dan PRBBK yang inklusi gender	38

1

TANTANGAN KEMANDIRIAN, KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN PRBBK

1.1. PENGANTAR

Indonesia adalah negara yang memiliki multi ancaman bencana, bahkan tidak sedikit penduduknya tinggal di kawasan rawan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2017 mencatat sebanyak 148,4 juta warga tinggal di daerah rawan gempa bumi, 5 juta di daerah rawan tsunami, 1,2 juta penduduk di daerah rawan erupsi gunung api, 63,7 juta jiwa di daerah rawan banjir, serta 40,9 juta jiwa tinggal di daerah rawan longsor. Kondisi ini menempatkan komunitas/masyarakat yang berada di Kawasan rawan bencana sebagai kelompok paling rentan. Sejarah pergerakan PRB di Indonesia tidak lepas dari silih bergantinya bencana yang terjadi di Indonesia. Di tingkat global, konsep berbasis komunitas dalam pengelolaan risiko bencana telah muncul sebagai alternatif penanganan bencana pada sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Di Indonesia sejarah perkembangan Pengurangan Risiko Bencana tidak lepas dari kemunculan gerakan-gerakan PRBBK di berbagai wilayah seperti Pengelolaan Risiko Bencana yang dilakukan oleh masyarakat Lereng Gunung Merapi pasca letusan/erupsi besar yang terjadi tahun 1994 di Turgo. Gerakan masyarakat terhadap upaya PRB muncul akibat adanya satu tujuan bersama untuk menghadapi ancaman bencana yang ada di sekitarnya, dari persamaan tujuan ini berkembang menjadi sebuah gerakan bersama dalam membangun kesiapsiagaan, memperkuat pengetahuan, siap dalam menghadapi masa tanggap darurat, dan dapat pulih Kembali pasca terkena dampak bencana.

PRBBK muncul dari adanya gerakan sosial terutama dari masyarakat yang hidup di Kawasan rawan bencana. Kemunculan gerakan PRBBK di Indonesia sejalan dengan perkembangan waktu yang dimulai dari periode kemunculan pada tahun 1996 - 1998 dimana gagasan PRB muncul yang diinisiasi oleh praktisi dan akademisi untuk memperbaiki praktek penanggulangan bencana yang lebih baik. Pada periode 1998 - 2006 merupakan periode Koalisi dimana gerakan PRB dan PRBBK sudah menjadi perhatian publik terutama pasca tahun 2004 setelah bencana tsunami Aceh, dimana program-program sudah mulai diorganisir melalui penyusunan tujuan dan membangun strategi gerakan dalam upaya menuju masyarakat tangguh. Pada periode tahun 2006 - 2008

gerakan PRB masuk pada periode birokratisasi dengan munculnya payung Hukum di Indonesia dengan lahirnya Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang memberikan semangat baru dalam upaya perbaikan penanganan bencana di Indonesia, kebijakan ini diperkuat dengan peraturan pelaksana sebagai turunannya antara lain PP No 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, dan Perpres No 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada periode 2008 sampai sekarang adalah masuk dalam periode hasil, dimana pada periode ini PRBBK menemukan bentuk & kecenderungannya.

Pelembagaan PRBBK dimulai sejak tahun 2005 dari program-program yang dilaksanakan oleh NGO dan INGO yang langsung mensasar kepada masyarakat di daerah rawan bencana telah dikembangkan sejak tahun 2005 melalui program-program PRBBK dan membangun ketangguhan masyarakat dengan berbagai isu yang diintegrasikan, dalam perjalanannya PRBBK mengalami proses pelembagaan oleh seluruh organisasi dimana hampir semua organisasi baik NGO/NGO yang bekerja di komunitas memiliki departemen di bidang PRB dan Humanitarian, dan menempatkan tenaga-tenaga ahli di bidang PRB dalam melaksanakan program-program di berbagai wilayah. Karena dilaksanakan sesuai dengan kondisi unik di masing-masing komunitas, metodologi PRBBK pada dasarnya amat beragam.

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), bersama dengan lembaga-lembaga pemerhati kebencanaan dan didukung oleh pemerintah, lembaga kemanusiaan nasional dan internasional, akademisi, pihak swasta dan komunitas telah menyelenggarakan 4 kali Simposium PRBBK sejak tahun 2004 dan 13 Kali Konferensi Nasional PRBBK sejak tahun 2009 sampai tahun 2021. Berbagai pembelajaran praktek baik telah dihasilkan dan menjadi pengetahuan baru yang telah membawa perubahan dan penguatan tata Kelola penanggulangan bencana di Indonesia antara lain adaptasi perubahan iklim, PRBBK yang inklusif, pengarusutamaan gender, mata penghidupan, UMKM Tangguh, anak-anak dan anak muda, keberlanjutan ekonomi, pandemi COVID-19 dan perlindungan sosial. Tahun 2012 Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Perka BNPB No 2012 tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana telah melembagakan PRBBK dan membagi ketangguhan masyarakat terhadap bencana ke dalam 20 Indikator Ketangguhan.

Program Destana adalah program BNPB dan BPBD yang diadopsi dari program PRBBK yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Program PRBBK menjadi sangat masif pasca lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi kewenangan kepada Desa dalam membangun dan mengembangkan Desa serta pengelolaan dana desa. Lebih dari 53,000 desa di Indonesia berada di daerah rawan bencana, berbagai program berbasis desa dari kementerian/lembaga telah digulirkan di seluruh desa-desa di Indonesia antara lain Desa Tangguh Bencana (BNPB), Kampung Iklim (KLHK), Desa-desi dan Desa Siaga (Kementerian Kesehatan), Kampung Siaga Bencana (Kemensos), Desa Mandiri Pangan (Kementan), Desa Mandiri Energi (ESDM), Desa Siaga Pariwisata (Kementerian Pariwisata), Desa Pesisir Tangguh (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Berbagai kebijakan telah dihasilkan di dalam memperkuat desa dari berbagai sektor, ini dapat menjadikan peluang bagi masyarakat untuk lebih mendapat penguatan dalam membangun ketangguhan terhadap bencana.

Sejak tahun 2020 Dunia dan Indonesia menghadapi Pandemi COVID-19, Selain ketidakpastian risiko pandemi COVID-19, berbagai ancaman bencana juga terjadi dalam masa pandemi ini. Selama 2020 saja tercatat sekurangnya 2.952¹ kejadian ancaman atau bencana di Indonesia baik yang berasosiasi terhadap krisis iklim maupun proses geologis. Kondisi tersebut semakin menambah tingkat risiko masyarakat yang hidup dalam kawasan rawan bencana, karena dalam waktu bersamaan harus terpapar ancaman pandemi maupun ancaman bencana lainnya dalam kurun waktu dua tahun ini. Untuk itu, upaya-upaya membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan perubahan iklim yang mengintegrasikan penguatan ekonomi dan perlindungan sosial juga esensial untuk mengurangi kerentanan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.

1.2. REFLEKSI GERAKAN PRBBK DI INDONESIA²

Pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan dampak langsung pada sektor kesehatan masyarakat namun juga berdampak negatif terhadap sektor ekonomi masyarakat secara nasional. Merespon situasi ini, Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas COVID- 19 dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain ketidakpastian risiko pandemi COVID-19, berbagai ancaman bencana juga terjadi dalam masa pandemi ini. Selama 2020 saja tercatat sekurangnya 2.952¹ kejadian ancaman atau bencana di Indonesia baik yang berasosiasi terhadap krisis iklim maupun

¹ BNPB 2020, Infografis Kejadian Bencana di Indonesia 2020

² Ringkasan Eksekutif KN-PRBBK XIV 2021

proses geologis. Kondisi tersebut semakin menambah tingkat risiko masyarakat yang hidup dalam kawasan rawan bencana, karena dalam waktu bersamaan harus terpapar ancaman pandemi maupun ancaman bencana lainnya dalam kurun waktu dua tahun ini. Untuk itu, upaya-upaya membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan perubahan iklim yang mengintegrasikan penguatan ekonomi dan perlindungan sosial juga esensial untuk mengurangi kerentanan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu, pengembangan praktik baik, perluasan jejaring serta pembelajaran inisiatif masyarakat ini dapat terkelola dan terus bergerak untuk menghasilkan pengetahuan - pengetahuan baru secara sistematis perlu untuk dilakukan secara kolektif melalui Konferensi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (KN-PRBBK) agar dapat memberikan dampak yang lebih luas.

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), bersama dengan lembaga-lembaga pemerhati kebencanaan dan didukung oleh lembaga kemanusiaan nasional dan internasional, akademisi, pihak swasta dan komunitas telah menyelenggarakan 4 kali Simposium PRBBK sejak tahun 2004 dan 13 Kali Konferensi Nasional PRBBK sejak tahun 2009 sampai tahun 2021. Berbagai pembelajaran praktek baik telah dihasilkan dan menjadi pengetahuan baru yang telah membawa perubahan dan penguatan tata Kelola penanggulngn bencana di Indonesia. Setelah sempat terhenti selama 3 (tiga) tahun, dengan pertimbangan perkembangan pandemik COVID 19 dan peran strategis komunitas dalam pengendalian dan percepatan penanganan COVID-19 saat ini, juga dinamika upaya-upaya pengurangan risiko bencana di tingkat tapak. MPBI mengajak para pihak menyelenggarakan Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas ke XIV-2021 dengan tema “Refleksi dan Penguatan Strategi PRBBK dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia”. Konferensi ini dilaksanakan secara *daring* atau *Online*.

KNPRBBK XIV-2021 memiliki tujuan strategis sebagai berikut: (1) Pendokumentasian pengetahuan dan praktik-praktik PRBBK di Indonesia, (2) Pemutakhiran pendekatan, pengetahuan dan praktik-praktik PRBBK di Indonesia, (3) Penguatan jejaring gerakan PRBBK di Indonesia, (4) Pengembangan PRBBK sebagai strategi percepatan penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional dan membangun ketangguhan masyarakat . Secara umum KNF PRBBK XIV ini berhasil mendokumentasikan pengetahuan dan praktik PRBBK di wilayah-wilayah dan Indonesia secara umum. Ada pemutakhiran pendekatan, pengetahuan, praktik-praktik PRBBK. Selama proses pra-konferensi dan konferensi, jejaring Gerakan PRBBK di Indonesia diperkuat. Ada rumusan pengembangan PRBBK sebagai strategi percepatan penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional dan

membangun ketangguhan masyarakat.

Hasil refleksi wilayah menghasilkan 4 isu besar yang menjadi catatan penting antara lain

- 1 **Penguatan Tata Kelola PRBBK** yang meliputi harmonisasi dan sinergitas kebijakan dari level nasional sampai ke level desa dan komunitas, penerapan kebijakan yang inklusif yang berpihak pada kelompok rentan, penguatan kearifan lokal dalam PRBBK, penguatan kapasitas kepada pemangku kebijakan, pendekatan Kawasan, kemudahan akses informasi bencana di Indonesia, kebijakan strategis dan operasional terkait kordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi program-program berbasis desa/kelurahan dalam upaya membangun ketangguhan masyarakat/PRBBK.
- 2 **Pemutakhiran Praktik dan Kemitraan PRBBK yang Lebih Kuat** meliputi integrasi risiko- risiko bencana secara holistic akibat bencana, dampak perubahan iklim, pandemi COVID- 19, degradasi lingkungan, dan ancaman non alam lainnya; isu tentang ketangguhan UMKM, membangun kesejahteraan dan perlindungan sosial, pengintegrasian PRBBK kepada pentahelix, peringatan dini yang inklusif, pendokumentasian pengetahuan lokal secara partisipatif, regenerasi pengetahuan dan keterampilan PRBBK di Indonesia melalui perluasan literasi, demokratisasi pengetahuan kebencanaan, dan optimasi peran institusi Pendidikan, dan kolaborasi yang inklusif, dan saling menguatkan fungsi, peran, kontribusi dan keterlibatan berbagai aktor dalam penguatan PRBBK
- 3 **Peningkatan mutu kualitas PRBBK yang berkelanjutan** meliputi pendokumentasian praktik baik PRBBK, pengembangan indikator capaian PRBBK, mekanisme umpan balik yang inklusif, memperkuat pengorganisasian, peningkatan kapasitas dan penguatan jejaring, dan pengembangan sistem informasi PRBBK yang inklusif dan partisipatif yang dapat diakses oleh semua pihak, pengembangan potensi kelompok rentan.
- 4 **Perlu adanya data dan informasi PRBBK** yang dapat memberikan akses informasi terkait dengan program, komunitas, lokasi program, penilaian ketangguhan masyarakat, ketersediaan informasi tentang fasilitator PRBBK di daerah, dan literatur yang berkaitan pembelajaran praktik baik dan buruk PRBBK.

Tata Kelola PRBBK di Indonesia mulai dari kebijakan operasional, mekanisme pendanaan dan pelembagaan PRBBK. Dalam diskusi pleno 1 diidentifikasi berbagai kebijakan yang dapat mendukung PRBBK di desa dan komunitas, yang berkaitan dengan program berbasis desa yang memiliki lokus di desa dari berbagai kementerian dan lembaga. Secara operasional kebijakan-kebijakan yang ada telah memberi ruang dalam mengimplementasikan PRBBK melalui program desa dan dana desa.

Tantangan yang dihadapi adalah banyaknya program dari berbagai kementerian sehingga membuat desa memiliki beban yang berat untuk melaksanakan semua program, karena tidak ada sinkronisasi antara satu program dengan yang lain. Disisi lain, ada peluang untuk melakukan sinkronisasi antar semua program yang di implementasikan di desa, karena sudah ada panduan/dasar hukum untuk mengintegrasikan program. Untuk bisa mencapai tujuan besar tersebut, harus ada kesepahaman antara semua stakeholder baik di tingkat desa sampai tingkat yang lebih atas. Pada tingkat terbawah harus didukung oleh kebijakan di daerah atau Peraturan Daerah (Perda) yang dapat menjembatani program-program berbasis desa, karena desa sangat tergantung kepada pemerintah daerah sebagai pengampu di daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Program PRB sangat mungkin untuk masuk dan diintegrasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh lembaga/kementerian lain dengan memanfaatkan sumber pendanaan di tingkat desa. Selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas terhadap pemerintah daerah dan aparat pemerintah desa. Isu desentralisasi PRB di tingkat desa cukup menarik dibahas adalah bagaimana pemerintah di tingkat kota/kabupaten mendukung desa untuk bisa mengoptimalkan upaya PRB di desa.

PRBBK adalah gerakan dalam masyarakat untuk membangun kepedulian dalam mengurangi risiko bencana. Tujuan PRBBK adalah menyadarkan masyarakat bahwa mereka berada di daerah rawan bencana, dengan adanya kesadaran tersebut harapannya masyarakat lebih aktif dalam aktivitas membangun kesiapsiagaan. Karena masyarakat adalah *first responder* ketika ada kejadian bencana, sehingga kesiapsiagaan harus dimulai dari masyarakat itu sendiri. Berbicara tentang replikasi, substansinya adalah menyadarkan masyarakat bahwa mereka tinggal di daerah rawan bencana, maka masyarakat harus mengembangkan pola PRB sesuai dengan kearifan lokal mereka dalam menghadapi risiko bencana. Replikasi yang dilakukan selama ini terus dikembangkan dengan berbagai inovasi. Sebagai contoh, pendekatan di komunitas Merapi yang sudah dianggap berhasil, namun pada kenyataannya ada ketidakselarasan dengan pemerintah. Belajar dari kondisi ini, saat replikasi di lokasi lain pendekatannya dikembangkan secara

berbeda, yaitu melibatkan pemerintah dari awal. Kritik untuk program Destana, kenapa desa yang ditanggihkan, kenapa bukan kawasan yang ditanggihkan? Karena berbicara bencana akan berbicara kawasan. upaya PRB harus berbasis kawasan dan diharapkan setiap wilayah dapat saling koordinasi dan kolaborasi dalam PRB.

Inovasi bermakna PRBBK harus terus berkembang dan ada pembaharuan. Sebagai contoh, isu bencana saat ini bukan isu tunggal, dalam satu waktu dapat terjadi lebih dari satu jenis bencana yang berbeda, oleh sebab itu, isu inovasi harus terus dikembangkan, jika tidak maka model/metode PRBBK kita akan ketinggalan. Koordinasi bukan sekedar memperebutkan sumber daya, koordinasi adalah suatu hal yang sangat penting, karena jika proses koordinasi tidak berjalan dengan baik, proses penanggulangan bencana akan *chaos*. Koordinasi tidak hanya penting bagi pelaku PRB saja, namun juga bagi donor. Jika upaya ini tidak dilakukan dengan baik, akan terjadi tumpang tindih aktivitas dan hanya akan menyianyikan sumber daya yang ada. Untuk membangun kemitraan yang baik adalah dengan mengurangi ego sentris kelembagaan. Kemitraan dapat dibangun antar organisasi masyarakat sipil/*civil society organization* (CSO), kemitraan CSO dengan pemerintah, dan CSO dengan donor. Catatan penting kemitraan CSO dengan pemerintah harapannya tidak sekedar satu atau dua kali pertemuan bersama, sehingga esensi kemitraan tidak berjalan. CSO tidak hanya sekedar ditempelkan dan menjadi klaim bahwa pemerintah sudah bermitra dengan masyarakat melalui CSO.

Pendekatan PRBBK ini juga beraneka ragam dan bisa jadi semua pendekatan tersebut benar. Beberapa varian PRBBK di Indonesia antara lain waktu, pelaku, hubungan, partisipasi, ruang, isu, alat atau tools, dan sumberdaya. Setiap kelompok/komunitas mempunyai varian yang berbeda-beda dan bisa jadi semua benar, selama tidak lepas dari substansi PRBBK itu sendiri yaitu bersifat *bottom-up*, melibatkan masyarakat secara partisipatif, dan melindungi masyarakat dengan berbagai aset yang dimiliki.

Catatan penting dalam perjalanan PRBBK adalah dengan mengakomodir keberagaman dengan mempertimbangkan kebudayaan dan kebijakan lokal, berdasarkan hasil diskusi di wilayah, ditemukan kondisi bahwa kegiatan PRBBK belum mengakomodir kultur dan budaya di seluruh wilayah di Indonesia. Sintesa dari diskusi refleksi di wilayah-wilayah adalah : (1) Pengintegrasian pendidikan bencana dengan aspek *livelihood*; (2) Pelibatan aktif perempuan secara formal; (3) Pengakuan budaya lokal; (4) Penguatan modal sosial; (5) Peran relawan belum mendapatkan dukungan yang optimal serta komitmen pemegang otoritas; (6) Pengintegrasian kemampuan sumber daya alam melalui aktivitas ekonomi komunitas yang tinggal di kawasan rawan bencana; (7) Regenerasi dan kaderisasi; (8)

Alat pendukung aksi-aksi komunitas masih terbatas; (9) Dibutuhkan dukungan pihak eksternal; (10) Perubahan paradigma sebagai korban yang harus dibantu; (11) Proses-proses intervensi yang memberdayakan masyarakat dan mengubah pola pikir sebagai pelaku pembangun ketangguhan. Berbicara keberlanjutan PRBBK, ada tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu: efektifitas, partisipasi, dan kesetaraan. pantauan kualitas dan inklusi tidak lepas dari proses monitoring dan evaluasi. Program nasional Destana BNPB sesuai Perka BNPB No. 1 Tahun 2012.

Strategi PRBBK sesuai John Twigg 2007 dalam buku Pengalaman Indonesia Membangun Ketangguhan Masyarakat: tata kelola, pengkajian risiko bencana, pengetahuan dan pendidikan, manajemen dan pengurangan kerentanan, dan kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Instrumen monitoring menggunakan (1) Perka BNPB No. 1 Tahun 2021 ada 16 prinsip dan 20 indikator; (2) SNI 8357-2017 tentang desa dan kelurahan tangguh; (3) Penilaian Ketangguhan Desa (PKD), Tahun 2021; dan (4) Permendagri 101/2019: Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan Bencana. Inklusifitas dalam PRBBK banyak mengacu pada *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/Kerangka Aksi Sendai* dalam Pengurangan Risiko Bencana (*SFDRR*). Catatannya adalah, inklusifitas ini sebaiknya tidak hanya merangkul anak muda, perempuan, dan anak-anak, namun juga lansia dan *indigenous people*, serta kelompok migran. Praktik baik inklusifitas PRBBK yang sudah ada di Indonesia antara lain pelibatan anak muda dalam PRB. Adapun catatan penting yang muncul selama diskusi di wilayah dan dituangkan dalam kertas pleno #3 Pantauan kualitas dan inklusi dalam PRBBK:

1. *Empowering* inisiatif dari komunitas.
2. Gotong royong pentahelix menjadi kunci.
3. Perlunya *tools* monitoring partisipatif yang mudah dijangkau dan diisi oleh masyarakat (<http://www.aksikomunitas.id>).
4. Perlu mendorong *knowledge management* dan *knowledge production* dalam tingkat lokal secara partisipatif dan integrasi kearifan lokal, teknologi, serta pengetahuan modern.
5. Perlu mendorong aspek investasi ketangguhan infrastruktur untuk menjamin keselamatan masyarakat
6. Perlu mendorong *training of facilitator* secara rutin dan berkelanjutan untuk memberikan efek domino di daerah.
7. Perlu mendorong kapasitas dalam pengambilan keputusan.
8. Perlu mendorong kapasitas 7 objek ketangguhan.

9. Akselerasi PRBBK Inklusi dengan semangat ilmu pengetahuan, rekayasa, teknologi, dan inovasi.
10. Kolaborasi, mobilisasi sumber daya (manusia, sarana, prasarana, dan pendanaan)

2

PENDEKATAN INTEGRATIF PRBBK DI INDONESIA

2.1. PRINSIP DAN NILAI PRBBK

PRBBK bertujuan untuk mencapai pengurangan risiko bencana, pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan (keadilan). PRBBK dibayangkan sebagai komponen integral dari pembangunan berkelanjutan, karena membantu dalam menghindari dampak negatif bencana terhadap pembangunan. PRBBK membangun komunitas yang lebih aman, di mana masyarakat lokal, terutama yang paling rentan, sadar akan risiko bencana dan memiliki kapasitas untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga, properti, kehidupan dan produksi mereka dari efek negatif bahaya. Akibatnya, risiko berkurang dan bahaya tidak meningkat menjadi bencana.

Prinsip-prinsip inti yang harus memandu setiap langkah dan kegiatan dalam proses PRBBK dimanapun dilaksanakan. Pentingnya peran masyarakat dalam PRBBK menjadi kunci, dimana masyarakat tidak hanya penerima manfaat utama tetapi juga aktor kunci (perencana, pelaksana, mitra dan pemimpin) manajemen risiko bencana di wilayahnya. Masyarakat diberdayakan untuk memiliki partisipasi yang berarti dalam seluruh proses manajemen risiko bencana: menilai risiko, mengembangkan rencana, memilih dan mengimplementasikan rencana yang terpenting dalam proses ini, sementara dukungan dari kelompok yang paling tidak rentan terhadap mereka diperlukan untuk keberhasilan implementasi. Dalam PRBBK, pemerintah lokal dan nasional harus terlibat, dan komunitas yang mendukung untuk menangani ancaman bencana melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh komunitas.

Orang luar berfungsi sebagai fasilitator untuk dapat akan memahami masyarakat dengan lebih baik. PRBBK sangat memegang prinsip partisipasi aktif semua komponen yang ada di desa, sebagai perencana, pelaku dan yang memberikan evaluasi serta umpan balik, untuk mencapai hasil yang lebih baik, lebih praktis, efektif dan efisien. Kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana mampu beradaptasi dan bertransformasi untuk menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. PRBBK adalah sebuah

gerakan dari masyarakat/komunitas yang selalu diupayakan secara terus menerus, dimana tidak ada titik untuk berhenti.

Prinsip dan Nilai Inti dari Gerakan PRBBK di Indonesia adalah :

1. Sentralitas peran berpusat pada masyarakat/komunitas di dalam PRBBK
2. Prioritas peran yang diberikan kepada kelompok rentan menjadi aktor lokal yang dimampukan
3. Pengakuan atas persepsi yang berbeda dari risiko, ancaman, kerentanan dan kapasitas yang dipahami oleh masyarakat/komunitas.
4. Pendekatan multisektor dan multidisiplin
5. Mengintegrasikan PRBBK dengan proses pembangunan di tingkat lokal
6. PRBBK menjadi kerangka kerja yang terus berkembang dan dinamis
7. Pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim adalah proses, tujuan tertinggi membangun ketangguhan masyarakat/komunitas melalui kapasitas absortif, kapasitas adaptif dan kapasitas transformatif
8. PRBBK mengintegrasikan dengan isu global - local seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan

2.2. INTEGRASI PRBBK DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Berdasarkan skenario pemodelan, diperkirakan pada akhir 2100, suhu global akan lebih hangat 1.8-4°C dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999. Jika dibandingkan periode pra-industri (1750), kenaikan suhu global ini setara dengan 2.5-4.7°C. Proses pemanasan global terutama disebabkan oleh masuknya energi panas ke lautan (kurang lebih 90% dari total pemanasan), dan terdapat bukti bahwa laut terus menghangat selama periode ini. Perubahan iklim adalah masalah global yang berdampak pada berbagai sektor termasuk human livelihood (penghidupan manusia) (Barnett, 2010).

Perubahan iklim juga berdampak pada peningkatan kejadian bencana terkait iklim, menurut catatan BNPB kejadian bencana yang terjadi pada periode 2013 - 2020 sebanyak 1500 sampai lebih dari 2000 kejadian bencana setiap tahunnya, dan terus mengalami kenaikan, 90% kejadian bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Pendekatan PRBBK dapat menyesuaikan

dengan segala ketidakpastian yang dihadapi oleh komunitas yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Peningkatan frekwensi, intensitas, dan dampak negatif dari perubahan iklim telah menjadi isu pembangunan di Indonesia³. Dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian berbagai sector sebesar RP. 115,53 Triliun pada tahun 2024 (Bappenas, 2019). Selain itu, perubahan iklim juga memicu peningkatan intensitas dan frekwensi kejadian bencana yang berasosiasi dengan cuaca atau iklim ekstrem, mencapai 99,2% dari total kejadian bencana di Indonesia dalam satu dekade ini⁴. Dari tingkat nasional hingga daerah, baik pemerintah maupun masyarakat sipil perlu membangun dan meningkatkan ketahanan iklim. Untuk itu, pengembangan tata kelola yang baik sebagai upaya meningkatkan kapasitas dalam mengelola risiko perubahan iklim diperlukan.

Aspek pengelolaan risiko bencana oleh komunitas yang mendasar adalah menghadapi ketidakpastian dari ancaman yang ada disekitarnya, baik akibat perubahan iklim ataupun akibat bencana. Perubahan iklim adalah masalah global yang berdampak pada berbagai sektor termasuk human livelihood (penghidupan manusia) (Barnett, 2010).

Perubahan iklim juga berdampak pada peningkatan kejadian bencana terkait iklim, menurut catatan BNPB kejadian bencana yang terjadi pada periode 2013 - 2020 sebanyak 1500 sampai lebih dari 2000 kejadian bencana setiap tahunnya, dan terus mengalami kenaikan, 90% kejadian bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Sejalan dengan target pemerintah dalam manajemen risiko bencana, tahun 2009, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) mengadakan sebuah konvensi kebijakan di Stockholm, Sweden dengan tema 'Climate Smart Disaster Risk Management'. Forum tersebut mempertemukan para pakar iklim global dan bencana untuk mengembangkan pendekatan baru yang dinamakan Climate Smart Disaster Risk Management (CSDRM).

CSDRM adalah pendekatan mengintegrasikan PRB dan adaptasi perubahan iklim atau di Indonesia dikenal dengan konvergensi API dan PRB, untuk memberikan panduan mengenai perencanaan strategis, pengembangan program dan pembuatan kebijakan, yang digunakan sebagai penilaian pada efektivitas dari kebijakan Disaster Risk Management, proyek, dan program yang sudah ada dalam konteks perubahan iklim. Pendekatan CSDRM mempertimbangkan aksi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam

³ Bappenas. (2018). Kaji Ulang RAN API: Kajian Basis Ilmiah Proyeksi Iklim Atmosferik. Bappenas, Jakarta

⁴ BNPB 2021. Hasil analisis database bencana Indonesia. Tanah longsor, Banjir, Puting Beliung, Kekeringan, dan Gelombang ekstrem secara berurutan yang paling sering terjadi di wilayah kepulauan Indonesia

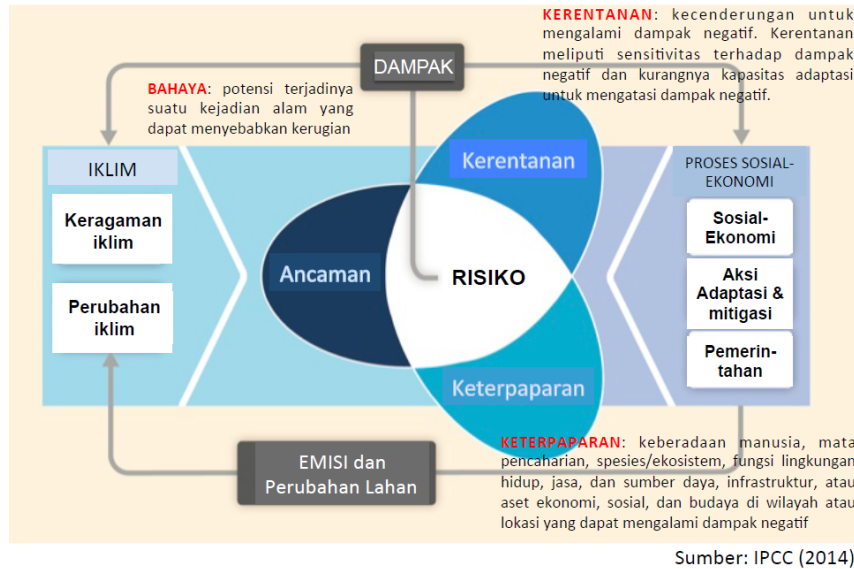
merespon variabilitas iklim saat ini dan di masa depan. Tiga pilar utama dalam pendekatan CSDRM, yang kaitan utamanya dengan The Progression of Vulnerability dari akar masalah (*Root causes*) kepada kondisi yang tidak aman (*unsafe conditions*) (Wisner et al. 2004) dan berhubungan dengan ketahanan, kapasitas adaptif dan ketidakpastian (e.g. Holling 1973, Folke 2006). Tiga pilar tersebut adalah: (1) Mengatasi perubahan risiko bencana dan ketidakpastian, (2) Meningkatkan kapasitas adaptif, dan (3) Mengatasi kemiskinan, kerentanan dan penyebab strukturalnya.

Menurut Tom Mitchell (2010) seperti dalam Vincent dan Mambo (2017), konsep CSDRM adalah langkah awal untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan variabilitas dalam membantu pembuat kebijakan dengan langkah-langkah praktis untuk mengalokasikan sumber daya untuk mengurangi risiko saat ini dan masa depan di semua tingkatan, pendekatan berbasis bukti untuk memasukkan perubahan iklim ke dalam model pengurangan risiko bencana saat ini. Berikut adalah gambaran dari konsep CSDRM:



Gambar 2.1. Konsep *Climate Smart Disaster Risk Management* (CSDRM)
Sumber : Modifikasi dari Mitchell et al. (2010)

Risiko bencana dapat dirumuskan berdasarkan dua faktor yang berhubungan (1) peristiwa, fenomena atau aktivitas manusia yang berpotensi merusak-bahaya, (2) tingkat kecenderungan (*susceptibility*) elemen-elemen berisiko untuk terpapar kepada sumber tersebut-kerentanan. Berdasarkan hubungan di atas risiko bencana dapat diperhitungkan dengan rumus (Blaikie, dkk., 1994 dalam Affeltranger, dkk., 2006), tidak kerkecuali bencana yang diakibatkan oleh faktor iklim.



Gambar 2.2. Rumusan risiko iklim hubungan antara ancaman, kerentanan dan keterpaparan (Sumber : IPCC, 2014)

Berdasarkan evidence base dari berbagai negara IPCC mengakui adanya saling ketergantungan antara iklim, ekosistem, dan keanekaragaman hayati, dan masyarakat manusia dan terintegrasi pengetahuan yang lebih kuat di seluruh ilmu alam, ekologi, sosial dan ekonomi, dimana strategi tentang Perubahan Iklim dilakukan dari pendekatan risiko iklim, yang menepatkan risiko dampak perubahan iklim sebagai strategi yang harus direspon dalam pembangunan antara lain Human Society, Ecosystem termasuk biodiversity, potensi risiko dan dampak akibat perubahan iklim. Interaksi ini adalah dasar dari risiko yang muncul dari perubahan iklim, degradasi ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati dan, pada saat yang sama, menawarkan peluang untuk masa depan

Komponen risiko yang menjadi perhatian adalah climate hazard, vulnerability/kerentanan dan exposure/keterpaparan menghasilkan dampak dan risiko yang dapat melampaui batas adaptasi dan mengakibatkan kerugian dan kerusakan.

Dalam pengintegrasian PRB dan Adaptasi Perubahan Iklim terdapat faktor-faktor utama yang tidak terpisah dalam membangun sebuah ketahanan, baik dari perspektif pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, maupun SDGs. Komponen tersebut adalah Risiko, Bahaya, Keterpaparan, Kerentanan, dan Adaptasi. Selain itu, pergeseran pendekatan dari yang semula berorientasi terhadap pengelolaan risiko iklim

menjadi membangun ketahanan iklim. Memenuhi tujuan pembangunan tangguh iklim yang dapat mendukung kesehatan manusia, ekosistem dan planet, serta kesejahteraan manusia, membutuhkan masyarakat dan ekosistem untuk berpindah (transisi) ke keadaan yang lebih tangguh. Pengakuan risiko iklim dapat memperkuat aksi adaptasi dan mitigasi serta transisi yang mengurangi risiko.

2.3. PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF KOMUNITAS

Dampak bencana dan perubahan iklim tersebut diatas memberikan dampak jangka panjang kepada masyarakat yang terpapar langsung oleh ragam ancaman bencana, terutama masyarakat dengan mata pencaharian yang bergantung pada sumberdaya alam yang sensitif terhadap dampak perubahan iklim. Dengan adanya kejadian bencana dan Krisis iklim akan mengganggu aktivitas ekonomi dan atau menghilangkan asset ekonomi masyarakat. Dalam masa berkepanjangan hal ini akan meninggalkan persoalan kemiskinan pada masyarakat yang terpapar oleh ancaman bencana dan krisis iklim tersebut. Selain itu, kondisi masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk bertahan dan bangkit ke kondisi normal saat dilanda bencana atau krisis karena tidak memiliki sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya serta submerdaya cadangan atau alternatif untuk mendukung aktivitas ekonomi atau kegiatan produktif lainnya. Akibatnya, peningkatan kemiskinan akan terjadi dan seringkali kelompok ini termarginalkan dan kesulitan untuk mendapatkan akses layanan dan perlindungan sosial. Selain menghadapi bencana alam sepanjang tahun, Indonesia juga menghadapi dampak pandemik global COVID-19⁵.

COVID-19 tidak hanya kepada sektor kesehatan, sektor sosial-ekonomi khususnya pada kelompok masyarakat rentan dan miskin⁶. BAPPENAS juga telah melakukan perhitungan bahwa 55% penduduk miskin berpotensi jatuh miskin akibat dari COVID-19. Hal ini diperkuat juga melalui survey BPS bahwa 87.379 responden yang disurvei 22,74% tidak bekerja, 2,52% terkena PHK, dan 18,34% dirumahkan akibat pandemik COVID-19⁷. Kerugian ekonomi juga mencapai 1,35 T setara dengan 8,8% PDB 2020 Indonesia (Kemenkeu).

⁵ WHO menetapkan pandemic global per 11 Maret 2020. Indonesia pernah mencapai fatality rate dari kasus COVID-19 sebesar 2,62% lebih tinggi dari angka yang ditetapkan global yakni 2,16%. Krisis ini ditetapkan sebagai bencana non-alam nasional.

⁶ <https://smeru.or.id/> Studi Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi COVID-19 di Indonesia

⁷ <https://www.bps.go.id/publication/> Survey Sosial Demografi Dampak COVID-19

Peningkatan Angka Kemiskinan di Indonesia tidak terhindarkan akibat COVID-19. Tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2019 mencapai 24,79 Juta Jiwa (9,22%) dan akan meningkat menjadi 28,7 juta jiwa jika tidak ada program perlindungan sosial, meskipun program perlindungan sosial dilakukan angka kemiskinan tetap meningkat mencapai 26,2 juta (Bappenas-Dit.PKPM)⁸. Melihat kondisi kemiskinan tersebut, maka fokus penanganan pandemik COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia fokus pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dimana anggaran sebesar RP. 451 Triliun akan dialokasikan untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial⁹.

Berbagai studi tentang pembangunan komunitas aspek penguatan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan sosial sangat fundamental dalam membangun ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan¹⁰. Melalui pendekatan tersebut diharapkan penyelesaian akar masalah kerentanan komunitas yang berasosiasi dengan faktor kemiskinan dapat dilakukan sehingga dapat membangun ketangguhan komunitas berisiko¹¹. Selain itu, program-program perlindungan sosial yang adaptif terhadap isu kebencanaan maupun krisis iklim juga esensial untuk mengurangi kerentanan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang¹². Skema Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) ini sendiri juga sedang dikembangkan oleh BAPPENAS sebagai bentuk reformasi perlindungan sosial yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat rentan yang terdampak bencana, risiko iklim, dan pandemik COVID-19.

Dengan berbagai faktor dan kondisi yang berkembang saat ini, di mana keterpaparan geografis yang masif, kerentanan sosial-ekonomi masyarakat kawasan rawan bencana paska COVID-19, kecenderungan kejadian ancaman bencana dan krisis iklim, serta komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun ketangguhan bencana dan pengendalian perubahan iklim untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, serta perkembangan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang telah memberikan ruang kewenangan di tingkat desa¹³, maka pengembangan pendekatan yang dapat mengintegrasikan komponen pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan

⁸ BAPPENAS 2021., Arah Kebijakan dan Kolaborasi Program Perlindungan Sosial Adaptif. Disampaikan dalam FGD Forum Konsultatif K/L Sinergitas Program Membangun Ketangguhan Bencana Berbasis Masyarakat. BNPB-SIAPSIAGA

⁹ <https://covid19.go.id/artikel/2022/01/18/pemerintah-siapkan-rp451-triliun-untuk-program-pemulihan-ekonomi-nasional-2022>

¹⁰ John Twigg., 2015. *Good Practice Review 9: Disaster Risk Reduction, Chapter 9: Livelihood and DRR* & John Twigg., 2009 *Character of Disaster Resilience Community*

¹¹ Pasteur.K.,2011. *From Vulnerability to Resilience: A framework for analysis and action to build community resilience.*

¹² Arnall et al., 2013 *Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif (Adaptive Social Protection)*

¹³ UU No.6/2014 tentang Desa mengatur kewenangan desa dalam merumuskan pembangunan diwilayahnya.

perlindungan sosial bagi kelompok rentan ke dalam program berbasis masyarakat di tingkat desa/kelurahan menjadi krusial¹⁴. Pendekatan tersebut bertujuan agar sinergi dan pelaksanaan program berbasis masyarakat dapat menyoal penyelesaian akar masalah kerentanan sosial-ekonomi serta membangun karakter masyarakat tangguh yang berkelanjutan.

GPDRR 2022 di Bali telah merekomendasikan 7 Agenda resiliensi berkelanjutan¹⁵ yang menekankan pada kolaborasi, sinergi kebijakan, perubahan risiko sistemik dengan investasi PRB, pengintegrasian PRB dan API, pendekatan partisipatif yang berpusat pada komunitas, multihazard early warning system yang memberikan perlindungan, membangun kapasitas transformatif belajar dari Pandemi COVID-19, dan pelaporan yang komprehensif dalam pencapaian SFDRR 2030 dalam membangun tata kelola risiko yang lebih baik menuju ketangguhan berkelanjutan. Rekomendasi untuk pendekatan partisipatif yang berpusat pada komunitas ini menggemakan rancangan dan tindakan Pemerintah yang selama ini sudah memasukkannya dalam prioritas strategis. Para aktor Pemerintah untuk Penanggulangan Bencana melihat perlunya kolaborasi untuk upaya-upaya PB yang berpusat pada komunitas yang dilakukan dalam skema pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dalam penanggulangan risiko sistemik.

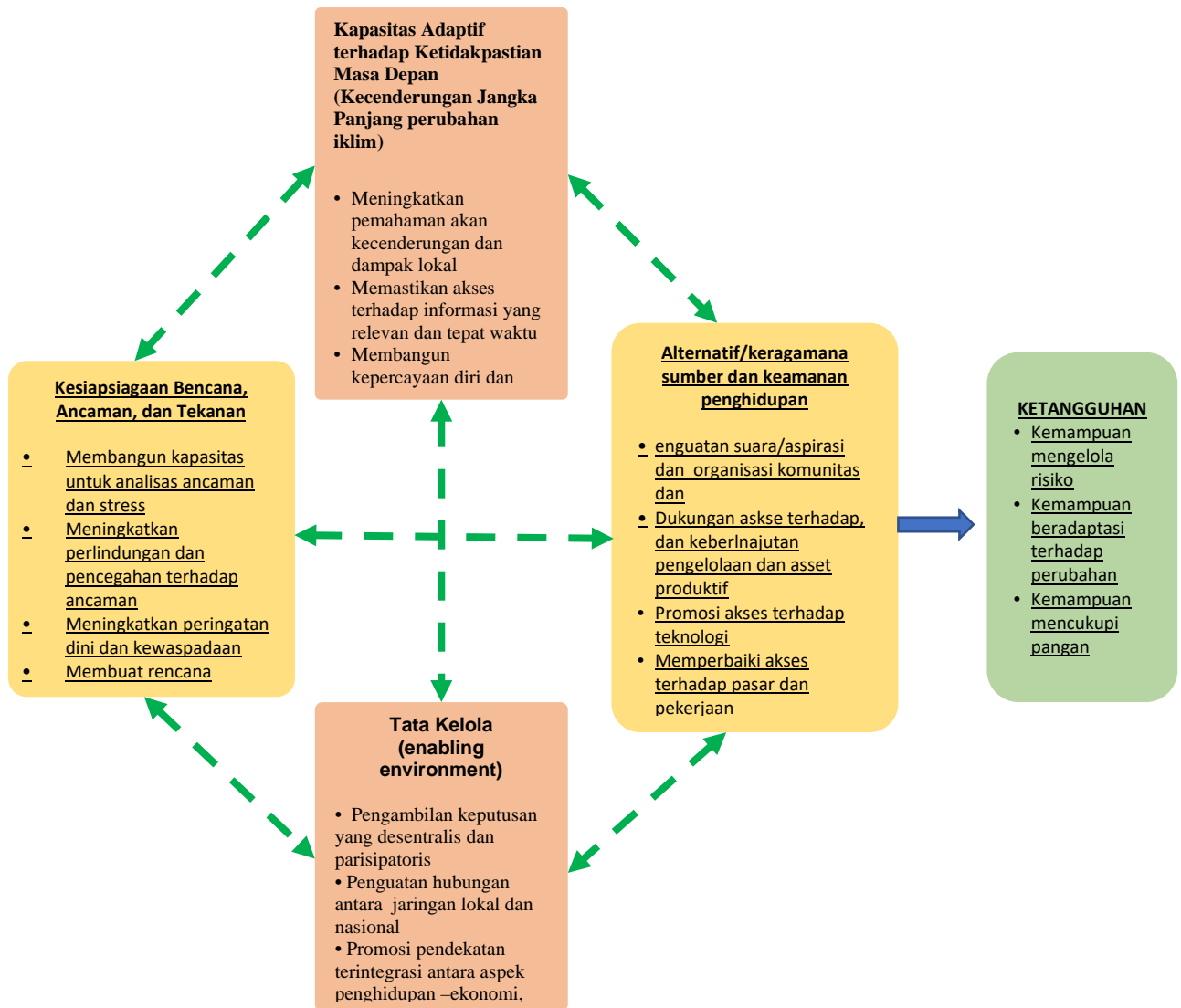
Secara umum pengembangan kerangka ini mengacu pada pendekatan kerangka ketahanan dan penghidupan berkelanjutan (Pasteur., 2011). Kerangka ini memiliki 4 komponen utama yang memfokuskan pada aspek berikut:

1. Membangun Kapasitas Adaptif terhadap Ketidakpastian Masa Depan (Kecenderungan Jangka Panjang, perubahan iklim)
2. Membangun Kesiapsiagaan terhadap Bencana, Ancaman dan Tekanan Iklim
3. Pengembangan sumberalternatif dan keamanan penghidupan
4. Membangun Tata Kelola yang baik

Melalui pelaksanaan 4 komponen tersebut diharapkan masyarakat berisiko mampu mengelola risiko, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan mencukupi kebutuhan pangannya (Gambar 2.3)

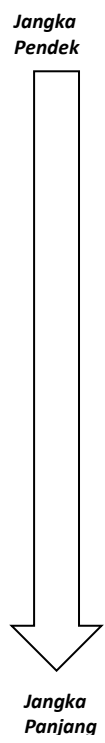
¹⁴ Kertas Posisi KNPRBBK XIV 2021

¹⁵ <https://bnpb.go.id/berita/tujuh-rekomendasi-agenda-bali-untuk-resiliensi-berkelanjutan>



Gambar 2.3. Kerangka Resiliensi dan Ekonomi Berkelanjutan (Pateur et al., 2011)

Pendekatan Perlindungan Sosial Adaptif telah mengkategorikan skema perlindungan sosial yang mencakup aspek membangun strategi coping sebagai upaya protektif dan preventif, membangun kapasitas adaptif sebagai upaya promotif dan transformative. Kategori tersebut memberikan benefit terhadap komponen API-PRB (gambar 2.3).



Kategori Proteksi Sosial	Instrumen Proteksi Sosial	Benefit dalam PRB dan API
Protektif (Coping Strategy)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayana proteksi sosial • Transfer sosial dasar (Makanan/Bantuan Tunai) - Skema Pensiun - Program pekerjaan umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan terhadap kelompok rentan yang berisiko terhadap risiko iklim, dengan kapasitas adaptif yang terbatas
Preventif (Coping Strategy)	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Transfer sosial - Diversifikasi penghidupan - Asuransi lahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah kerusakan strategi coping dan asset penghidupan yang tergantung pada variable iklim cuaca
Promotif (Building Adaptive Capacity)	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan/Transfer sosial - Akses kredit - Transfer/proteksi asset - Akses terhadap sumberdaya - Program pekerjaan umum - Kegiatan adaptif 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan ketangguhan melalui diversifikasi livelihood dan keamanan terhadap ancaman terkait iklim - Promosi peluang baru yang muncul dari perubahan iklim
Transformatif (Building Adaptive Capacity)	<ul style="list-style-type: none"> - promotion of minority rights - anti-discrimination campaigns - social funds 	<ul style="list-style-type: none"> - Transformasi relasi sosial melawan diskriminasi dan akar masalah kerentanan sosial politik

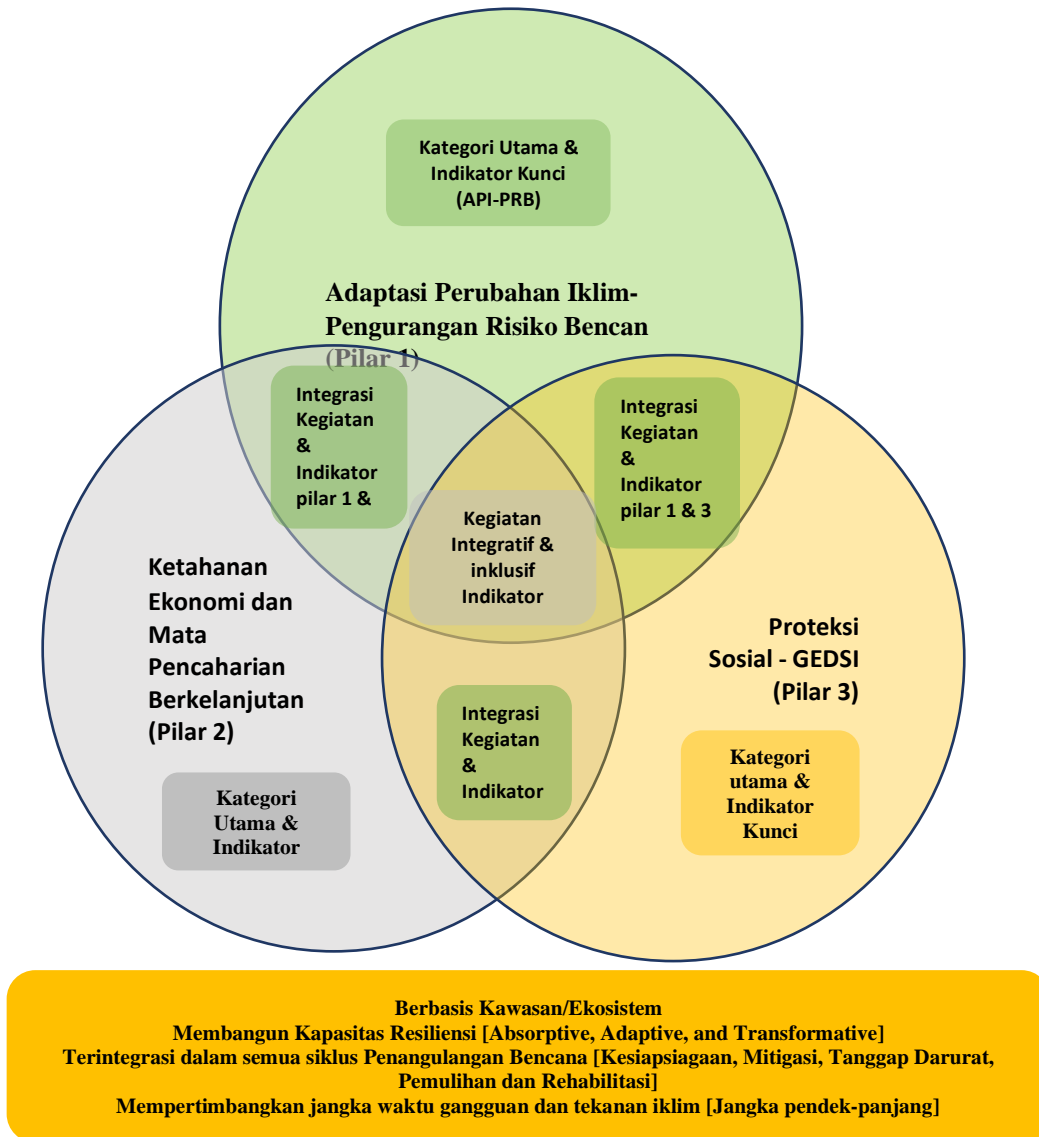
Gambar 2.4. Kerangka Perlindungan Sosial Adaptive (*Arnall et al., 2010 modified from Davies et al., 2009*)

Sementara dalam kerangka GEDSI terdapat 4 komponen kunci berupa akses, partisipasi, control terhadap sumberdaya dan pengambilan keputusan, serta manfaat dari kebijakan dan program membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana dan risiko iklim. Adanya keunikan dan keserupaan komponen dan aktivitas kunci dari masing-masing kerangka dasar pengembangan kerangka konseptual pengembangan ketangguhan komunitas berbasis kesejahteraan, maka pendekatan model yang integratif dipilih dalam mengkonstruksi kerangka konseptual ketangguhan komunitas berbasis kesejahteraan (gambar 2.4).

Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) di komunitas dapat dibentuk dari strategi yang diciptakan oleh komunitas dalam beradaptasi dan meningkatkan kapasitas yang memadukan API-PRB, Ketahanan Ekonomi, dan Perlindungan Sosial-GEDSI, sehingga memiliki tujuan utama (ultimate goal) membangun kapasitas resiliensi termasuk didalamnya kapasitas absorptif/coping, adaptif, dan transformatif terhadap ragam ancaman dan risiko. Fungsi ruang dalam kerangka konsep ini mengikuti pendekatan berbasis kawasan atau fungsi

ekosistem. Sementara fungsi waktu merujuk pada siklus penanggulangan bencana dan dampak jangka pendek dan panjang perubahan iklim. Dalam siklus penanggulangan bencana melingkupi fase mitigasi, kesiapsiagaan, respon darurat, dan pemulihan bencana. Sedangkan dalam konteks perubahan iklim melingkupi dampak dan respon dalam jangka pendek serta jangka panjang dari risiko perubahan iklim.

KERANGKA KONSEPTUAL KETANGGUHAN MASYARAKAT BERBASIS KESEJAHTERAAN



Gambar 2.5. Kerangka Konseptual Ketangguhan Bencana Masyarakat Berbasis Kesejahteraan (Forum Kolaborasi K/L., 2022)

Masing-masing kerangka dasar memiliki komponen dan indikator kunci yang unik, namun juga ada yang saling bersinggungan dan serupa. Untuk itu, arsip komponen dan indikator kunci dari ketiga kerangka tersebut digambarkan sebagai kegiatan-kegiatan yang

integrative, kolaboratif, dan inklusif dalam membangun kapasitas resiliensi masyarakat terhadap tekanan dan gangguan iklim serta pengurangan risiko bencana dalam siklus bencana, ha ini dapat dijelaskan pada tabel kegiatan kunci yang memadukan PRB-API, Sosial Adaptif dan GEDSI.

Tabel 2.1. Kegiatan Kunci API-PRB Daftar kategori dan indicator kegiatan pada API-PRB yang tidak bersinggungan dengan ERSL

KEGIATAN KUNCI API-PRB (CSDRM)	
Pilar	Indikator
Penanggulangan perubahan risiko bencana dan ketidakpastian perubahan iklim	1.3. Pengintegrasian pengetahuan risiko dan ketidakpastiannya kedalam rencana, kebijakan, dan program untuk mengurangi kerentanan dan keterpaparan nyawa masyarakat dan aset penghidupannya
Penyelesaian masalah kemiskinan dan kerentanan serta akar masalahnya	3,2 Pengembangan kemitraan untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat terhadap akses layanan dasar, aset produktif, dan sumberdaya
Penyelesaian masalah kemiskinan dan kerentanan serta akar masalahnya	3.3 Pemberdayaan komunitas dan otoritas lokal untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah nasional, NGOs, International dan swasta mempromosikan akuntabilitas dan transparansi
Penyelesaian masalah kemiskinan dan kerentanan serta akar masalahnya	3.4 Promosi lingkungan yang sensitive dan pembangunan "Climate-smart"

Tabel 2.2. Integrasi Kegiatan API-PRB dan ERSL : Daftar kategori dan indicator kegiatan API-PRB yang bersinggungan dnegan ERSL

API-PRB (CSDRM)		Kerangka Resiliensi dan Livelihood (Pasteur.,2011)	
Pilar	Indikator	Pilar	Indikator/Kegiatan Kunci
Penanggulangan perubahan risiko bencana dan ketidakpastian perubahan iklim	1.1 Penguatan Kolaborasi dan integrasi para actor yang bekerja dalam sektor PB, Iklim dan pembangunan	Tata Kelola (enabling environment)	Penguatan hubungan antara jaringan lokal dan nasional
Penanggulangan perubahan risiko bencana dan ketidakpastian perubahan iklim	1.2. Kajian dampak perubahan iklim terhadap risiko bencana dan ketidakpastiannya untuk masa sekarang dan mendatang secara berkala	Kesiapsiagaan Bencana, Ancaman, dan Tekanan Iklim	Membangun kapasitas untuk melakukan analisis ancaman dan stress
Penanggulangan perubahan risiko bencana dan ketidakpastian perubahan iklim	1.4 Peningkatan akses semua pihak terhadap informasi dan dukungan layanan risiko bencana yang berubah, ketidakpastiaan dan dampak perubahan iklim yang luas.	Kesiapsiagaan Bencana, Ancaman, dan Tekanan Iklim	Meningkatkan peringatan dini dan kewaspadaan
		Kapasitas Adaptif terhadap Ketidakpastian Masa Depan (Kecenderungan Jangka Panjang, perubahan iklim)	Memastikan akses terhadap informasi yang relevan dan tepat waktu
Penguatan Kapasitas Adaptasi	2.1 Penguatan kemampuan masyarakat, organisasi, dan jejaring untuk ujicoba dan inovasi	Alternatif/keragaman sumber dan keamanan penghidupan	Promosi akses terhadap teknologi
		Kapasitas Adaptif terhadap Ketidakpastian Masa Depan (Kecenderungan Jangka Panjang, perubahan iklim)	Membangun kepercayaan diri dan fleksibiitas dalam belajar dan bereksperimen

Penguatan Kapasitas Adaptasi	2.2. Promosi pembelajaran dan refleksi secara regular untuk meningkatkan implementasi kebijakan dan praktek	Kapasitas Adaptif terhadap Ketidakpastian Masa Depan (Kecenderungan Jangka Panjang, perubahan iklim)	Meningkatkan pemahaman akan kecenderungan dan dampak lokal
Penguatan Kapasitas Adaptasi	2.3 Memastikan kebijakan dan praktek untuk menanggulangi perubahan risiko bencana fleksibel, integrasi antar sektor dan skala serta memiliki mekanisme umpan balik yang berkala	Tata Kelola (enabling environment)	Promosi pendekatan terintegrasi antara aspek penghidupan -ekonomi, bencana dan perubahan iklim
Penguatan Kapasitas Adaptasi	2.4 Pemanfaatan alat dan metode untuk perencanaan menghadapi ketidakpastian dan peristiwa yang tidak terprediksi/diharapkan	Kesiapsiagaan Bencana, Ancaman, dan Tekanan Iklim	Membuat rencana kontinjensi dan kedaruratan
Penyelesaian masalah kemiskinan dan kerentanan serta akar masalahnya	3.1 Promosi sistem ekonomi yang setara	Alternatif/keragaman sumber dan keamanan penghidupan	Penguatan suara/aspirasi dan organisasi komunitas
		Tata Kelola (enabling environment)	Pengambilan keputusan yang desentralis dan partisipatoris

Tabel 2.3. Integrasi Kegiatan API-PRB dan ASP : Daftar indikator kunci API-PRB yang bersinggungan dengan indikator ASP

API-PRB (CSDRM)		Proteksi Social	
Kategori	Indikator	Kategori	Indikator/Kegiatan Kunci
Penguatan Kapasitas Adaptasi	2.1 Penguatan kemampuan masyarakat, organisasi, dan jejaring untuk ujicoba dan inovasi	Preventif (Coping Strategy)	Diversifikasi Penghidupan
Penguatan Kapasitas Adaptasi	2.2. Promosi pembelajaran dan refleksi secara regular untuk meningkatkan implementasi kebijakan dan praktek	Promotif (Building Adaptive Capacity)	Kegiatan adaptif
Penguatan Kapasitas Adaptasi	2.4 Pemanfaatan alat dan metode untuk perencanaan menghadapi ketidakpastian dan peristiwa yang tidak terprediksi/diharapkan	Promotif (Building Adaptive Capacity)	Transfer/proteksi asset
		Preventif (Coping Strategy)	Asuransi Lahan Pertanian
Penyelesaian masalah kemiskinan dan kerentanan serta akar masalahnya	3.1 Promosi sistem ekonomi yang setara	Transformatif (Building Adaptive Capacity)	promotion of minority rights
		Transformatif (Building Adaptive Capacity)	Anti-discrimination campaigns
		Promotif (Building Adaptive Capacity)	Akses kredit
		Promotif (Building Adaptive Capacity)	Program pekerjaan umum
Penyelesaian masalah kemiskinan dan kerentanan serta akar masalahnya	3,2 Pengembangan kemitraan untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat terhadap akses layanan dasar, asset produktif, dan sumberdaya	Transformatif (Building Adaptive Capacity)	social funds
		Protpektif (Coping Strategy)	Transfer sosial dasar (Makanan/Bantuan tunai)

Tabel 2.4. Kegiatan Kunci Ketahan Ekonomi dan Mata Pencaharian Berkelanjutan

Kerangka Resiliensi dan Livelihood (Pasteur.,2011)	
Pilar	Indikator/Kegiatan Kunci
Kesiapsiagaan Bencana, Ancaman, dan Tekanan Iklim	Meningkatkan perlindungan dan pencegahan terhadap ancaman
Kesiapsiagaan Bencana, Ancaman, dan Tekanan Iklim	Build Back Better-Pembangunan kembali yang lebih baik
Alternatif/keragaman sumber dan keamanan penghidupan	Dukungan akses terhadap, dan keberlanjutan pengelolaan dan asset produktif
Alternatif/keragaman sumber dan keamanan penghidupan	Memperbaiki akses terhadap pasar dan pekerjaan
Alternatif/keragaman sumber dan keamanan penghidupan	Memastikan kondisi hidup yang aman/berkecukupan
Tata Kelola (enabling environment)	Penyelesaian akar masalah/permasalahan sistemik

Tabel 2.5. Kegiatan Integratif ERSL dan ASP

Kerangka Resiliensi dan Livelihood (Pasteur.,2011)		Proteksi Social	
Pilar	Indikator/Kegiatan Kunci	Kategori	Indikator/Kegiatan Kunci
Kesiapsiagaan Bencana, Ancaman, dan Tekanan Iklim	Membangun kapasitas untuk melakukan analisis ancaman dan stress	Promotif (Building Adaptive Capacity)	Transfer/proteksi asset
Kesiapsiagaan Bencana, Ancaman, dan Tekanan Iklim	Build Back Better-Pembangunan kembali yang lebih baik	Protektif (Coping Strategy)	Program Pekerjaan Umum
Alternatif/keragaman sumber dan keamanan penghidupan	Penguatan suara/aspirasi dan organisasi komunitas	Transformatif (Building Adaptive Capacity)	Promosi hak minoritas
Alternatif/keragaman sumber dan keamanan penghidupan	Dukungan akses terhadap, dan keberlanjutan pengelolaan dan asset produktif	Preventif (Coping Strategy)	Asuransi Lahan Pertanian
Alternatif/keragaman sumber dan keamanan penghidupan	Memperbaiki akses terhadap pasar dan pekerjaan	Promotif (Building Adaptive Capacity)	Program pekerjaan umum
		Promotif (Building Adaptive Capacity)	Akses terhadap sumberdaya
Alternatif/keragaman sumber dan keamanan penghidupan	Memastikan kondisi hidup yang aman/berkecukupan	Protektif (Coping Strategy)	Transfer sosial dasar (Makanan/Bantuan tunai)
Tata Kelola (enabling environment)	Pengambilan keputusan yang desentralis dan partisipatoris	Transformatif (Building Adaptive Capacity)	Anti-discrimination campaigns
Tata Kelola (enabling environment)	Promosi pendekatan terintegrasi antara aspek penghidupan - ekonomi, bencana dan perubahan iklim	Preventif (Coping Strategy)	Diversifikasi Penghidupan
		Promotif (Building Adaptive Capacity)	Kegiatan adaptif
Tata Kelola (enabling environment)	Penyelesaian akar masalah/permasalahan sistemik	Transformatif (Building Adaptive Capacity)	social funds

Tabel 2.6. Kegiatan Kunci Proteksi Sosial

Proteksi Sosial	
Kategori	Indikator/Kegiatan Kunci
Protektif (Coping Strategy)	Pelayanan proteksi sosial
Protektif (Coping Strategy)	Skema Pensiun
Preventif (Coping Strategy)	Bantuan Transfer Social
Promotif (Building Adaptive Capacity)	Bantuan/Transfer sosial
Promotif (Building Adaptive Capacity)	Akses terhadap sumberdaya

3

SISTEM PERINGATAN DINI TERPADU BERPUSAT PADA MASYARAKAT¹⁶

3.1. SISTEM PERINGATAN DINI BERPUSAT PADA MASYARAKAT

Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) merupakan sebuah sistem terpadu (terintegrasi) yang mencakup pemantauan ancaman, peramalan dan prediksi, pengkajian risiko bencana, aktivitas komunikasi dan kesiapsiagaan; yang memungkinkan individu, komunitas, pemerintah, dunia usaha dan pihak-pihak lain mengambil tindakan tepat waktu untuk mengurangi risiko bencana ketika terjadi kejadian bahaya.

Tujuan dari pengembangan sistem peringatan dini yang berpusat pada masyarakat adalah untuk memberdayakan individu dan masyarakat yang terancam bahaya untuk bertindak dalam waktu yang cukup dan dengan cara-cara yang tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korban luka, hilangnya jiwa, serta rusaknya harta benda dan lingkungan.

Sistem peringatan dini '*end-to-end*' atau 'hulu sampai hilir' dan berpusat pada 'masyarakat' (*people centered*) yang efektif mencakup 4 elemen kunci yang saling terkait: (1) pengetahuan risiko bencana berdasarkan pengumpulan data dan kajian risiko bencana yang sistematis; (2) deteksi, pemantauan, analisis serta peramalan ancaman dan kemungkinan akibatnya; (3) diseminasi serta komunikasi peringatan yang tegas, tepat waktu, akurat dan bisa ditindaklanjuti, beserta informasi relevan tentang kemungkinan terjadi dan dampaknya, yang dilakukan oleh sumber resmi; dan (4) kesiapsiagaan di semua level untuk merespon peringatan yang diterima.

¹⁶ Draft Peduan Sistem Peringatan Dini Terpadu Berpusat Pada Masyarakat, BNPB, 2021

Supaya sistem bisa berjalan dengan efektif, keempat elemen yang saling terkait ini perlu dikoordinasikan baik di masing-masing komponen/sector dan level, maupun lintas komponen/sector dan level. Selain itu juga perlu adanya mekanisme umpan balik untuk perbaikan yang berkesinambungan. Kegagalan salah satu elemen atau kurangnya koordinasi antar komponen bisa menyebabkan gagalnya seluruh sistem.



Gambar 3.1. Elemen Sistem Peringatan Dini Terpadu dan Berbasis Masyarakat

3.2. SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS KOMUNITAS

Sistem Peringatan Dini Berbasis Komunitas (Community Based Early Warning System, disingkat CBEWS) adalah sistem yang dikembangkan, dikelola, dan dipelihara oleh komunitas itu sendiri, yang memberdayakan individu masyarakat dan komunitas yang terancam bahaya untuk bertindak dalam waktu yang cukup dan dengan cara yang tepat dalam upaya untuk mengurangi kemungkinan cedera, hilangnya nyawa, kerusakan harta benda, lingkungan dan hilangnya mata pencaharian.

Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat (CBEWS) mencari cara untuk membantu masyarakat menggunakan sumber daya dan kapasitas lokal secara efektif untuk lebih mempersiapkan dan menanggapi bencana dan mengadopsi langkah-langkah untuk mengurangi kerentanan dan keterpaparan bahaya mereka.

Arti penting CBEWS adalah pemberdayaan masyarakat. Kemampuan untuk memantau faktor-faktor yang mengubah bahaya (kejadian sebenarnya) menjadi

bencana (akibat kejadian terburuk dari kejadian tersebut) dapat membantu menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian penduduk yang berisiko. CBEWS memberi masyarakat, praktisi dan organisasi yang terlibat dalam manajemen risiko bencana berupa informasi awal risiko yang dapat segera diterjemahkan ke dalam tindakan pencegahan, kesiapsiagaan dan respons. CBEWS membantu mengurangi kerugian ekonomi dengan memungkinkan orang melindungi aset dan mata pencaharian mereka dengan lebih baik.

Sistem tersebut menyarankan bahwa orang-orang dari suatu komunitas dapat menjadi mampu dan memberdayakan mereka untuk melindungi dan mempersiapkan diri serta membuat mereka tahan terhadap dampak bencana. Masyarakat berada pada posisi terbaik untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

CBEWS memastikan bahwa individu dan komunitas memiliki pengetahuan tentang apa yang mengancam mereka dan mampu mengkomunikasikan perubahan dalam ancaman, dan bahwa mereka berada dalam posisi untuk merespons secara tepat waktu. Pemberdayaan masyarakat / komunitas akan menjadi pusat dan peran organisasi pendukung akan memfasilitasi partisipasi aktif dan bermakna dari semua anggota komunitas.

3.3. DASAR DAN PRINSIP SISTEM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT

Sistem peringatan dini berbasis masyarakat harus dapat berfungsi secara efektif dan memenuhi kebutuhan semua anggota masyarakat. Sistem peringatan dini berbasis masyarakat harus dibangun di atas empat landasan penting: CBEWS harus memenuhi kebutuhan semua anggota masyarakat. Kebutuhan khusus dari kelompok masyarakat yang paling rentan (perempuan, penyandang disabilitas, orang tua, dan anak-anak) harus dipertimbangkan.

Prinsip-Prinsip CBEWS: Efektivitas, Efisiensi, Ekuitas, dan Legitimasi

- 1) Efektivitas; Saat merancang sistem peringatan dini, seseorang harus memastikan bahwa hal-hal berikut dipertimbangkan sebagai keefektifan

sistem: Sistem adalah struktur untuk memastikan bahwa pesan peringatan dini mencapai orang terakhir dan paling rentan di masyarakat. Pesan peringatan dini harus membantu mengurangi risiko bencana dan bermanfaat untuk menyelamatkan modal manusia, fisik dan keuangan masyarakat. Pengelolaan sumber daya yang tepat untuk memastikan sumber daya digunakan dengan cara yang paling tepat.

- 2) Efisiensi; Agar CBEWS yang sudah ada berfungsi dengan baik, berarti sistem tersebut harus dikelola secara efisien dan efektif dalam melindungi kehidupan dan harta benda selama bencana terjadi. Efisiensi CBEWS dapat dinilai dengan cara berikut: Ada kebijakan dan sistem pengambilan keputusan yang cepat dan efektif untuk mencapai tujuannya? Pemahaman dan persepsi masyarakat tentang bahaya langsung harus jelas dan sesuai. Penyebaran pesan peringatan dini dan respon tepat waktu.
- 3) Ekuitas (atau keadilan); CBEWS harus memenuhi kebutuhan semua anggota masyarakat. Kebutuhan khusus kelompok masyarakat yang paling rentan harus diperhatikan (misalnya perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak). Nilai keadilan CBEWS dapat dinilai dengan cara berikut: Apakah sistem telah menyasar keadilan kemanusiaan? Apakah suara orang-orang yang paling rentan di komunitas didengar? Apakah kebutuhan khusus perempuan, orang tua, penyandang disabilitas dan anak-anak dipertimbangkan dan ditangani?
- 4) Legitimasi; Masyarakat menganggap pesan peringatan dini (yang) otentik dan menafsirkan dengan baik untuk mengatasi situasi dan membuat tanggapan. EWS dapat diadopsi dan dikembangkan sebagai praktik dan budaya umum masyarakat. Legitimasi CBEWS dapat dinilai dengan mengikuti: Apakah pesan peringatan dini diterima oleh komunitas atau pengguna akhir? Apakah ada kemungkinan munculnya pesan peringatan dini yang salah? Apakah masyarakat menanggapi peringatan dini? Apakah pengetahuan lokal / praktik peringatan dini tradisional diterima oleh sistem?

3.3. ISU-ISU PENTING

Ada beberapa isu penting yang harus dipertimbangkan di saat merancang dan

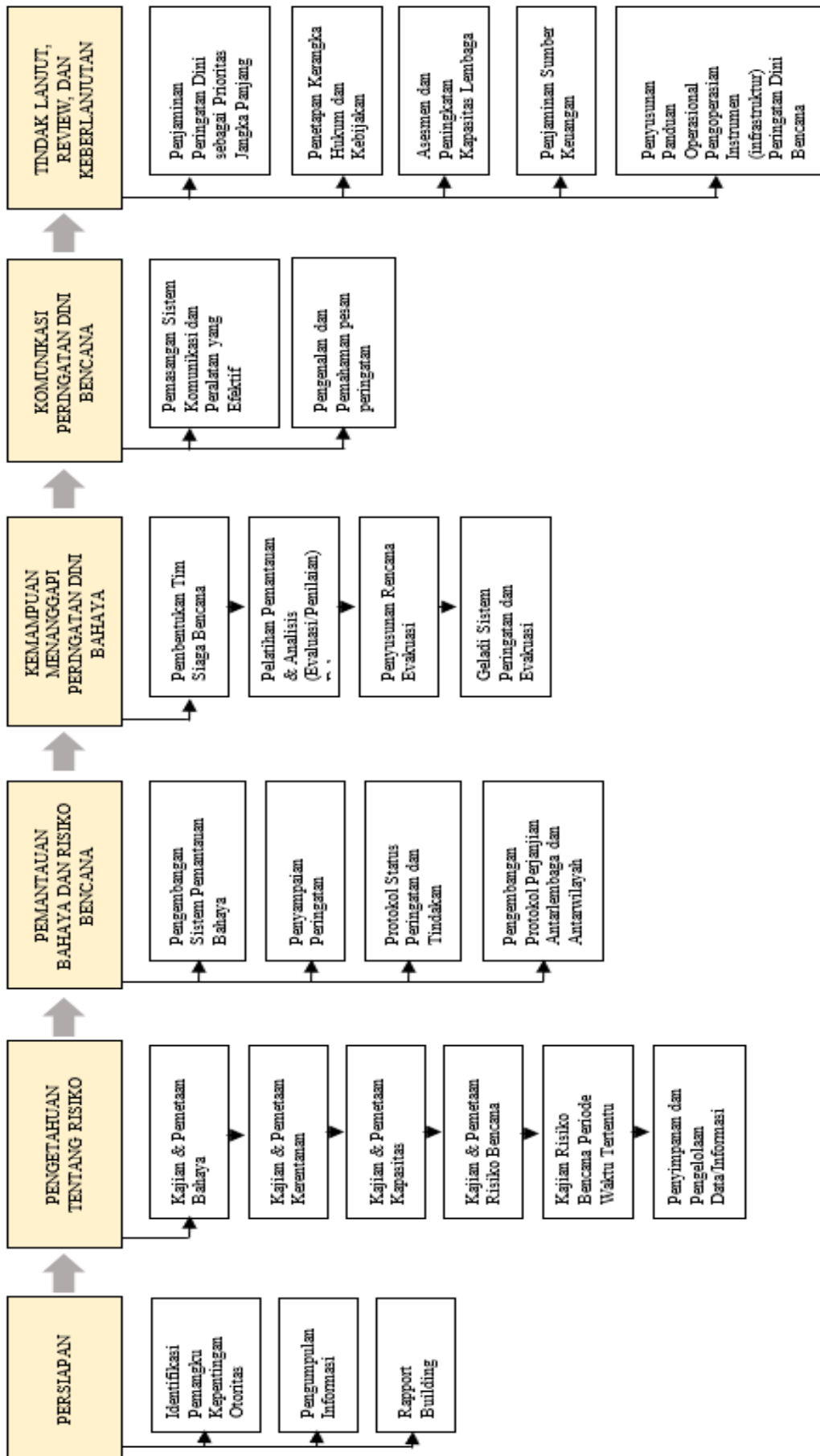
memelihara sistem peringatan dini yang efektif, yaitu:

- 1) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Pengaturan Kelembagaan. Tata kelola pemerintahan dan pengaturan kelembagaan yang berkembang dengan baik akan mendukung keberhasilan pengembangan dan keberlanjutan sistem peringatan dini. Keduanya merupakan dasar untuk membangun, memperkuat, dan memelihara keempat elemen sistem peringatan dini yang telah dijelaskan di atas. Tata kelola pemerintahan yang baik didorong oleh kerangka hukum dan peraturan yang kuat dan didukung oleh komitmen politik jangka panjang serta pengaturan kelembagaan yang efektif. Tata pemerintahan yang efektif harus mendorong pengambilan keputusan dan partisipasi lokal yang selanjutnya akan didukung oleh kemampuan administratif dan sumberdaya di tingkat nasional atau regional. Komunikasi dan koordinasi vertikal dan horisontal antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan peringatan dini juga harus terbentuk.
- 2) Pendekatan Multi-Bahaya. Sedapat mungkin, sistem peringatan dini harus memiliki kaitan dengan semua jenis bahaya. Nilai ekonomis, keberlanjutan dan efisiensi dapat ditingkatkan jika sistem dan kegiatan operasional telah terbentuk dan terpelihara dalam kerangka kerja yang menyeluruh dan mempertimbangkan untuk semua jenis bahaya dan kebutuhan pengguna akhir sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini multi-bahaya juga akan lebih sering diaktifkan daripada sistem peringatan dini satu-jenis bahaya, dan oleh karena itu keberfungsian dan keandalan akan lebih baik terhadap kejadian bencana besar dan berbahaya yang jarang terjadi, seperti tsunami. Sistem multibahaya juga akan membantu masyarakat umum memahami secara lebih baik tingkat risiko yang mereka hadapi, sehingga mereka akan berusaha meningkatkan kesiapsiagaan dan perilaku bahaya sesuai yang diinginkan.
- 3) Keterlibatan Masyarakat Setempat. Sistem peringatan dini yang terpusat ke masyarakat sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat yang paling terancam bahaya. Tanpa keterlibatan pemerintah daerah setempat dan masyarakat yang terancam bahaya, upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga lain tidaklah memadai. Pendekatan 'dari-bawah-ke-atas' di tingkat lokal terhadap peringatan dini, dengan partisipasi aktif masyarakat setempat,

akan membangkitkan tanggapan yang multi-dimensi terhadap masalah dan kebutuhan. Dengan demikian, masyarakat setempat, kelompok sipil, dan struktur tradisional dapat berperan dalam mengurangi kerentanan dan sekaligus memperkuat kemampuan lokal.

- 4) **Pertimbangan Perspektif Jender dan Keragaman Budaya.** Dalam mengembangkan sistem peringatan dini, sangat penting mengenali bahwa kelompok masyarakat yang berbeda akan memiliki kerentanan yang berbeda pula menurut budaya, jender, dan karakteristik lain yang mempengaruhi kapasitas dalam menyiapkan secara efektif pencegahan dan tanggapan terhadap bencana. Wanita dan pria seringkali memainkan peranan yang berbeda di dalam masyarakat dan mereka juga memiliki akses yang berbeda terhadap informasi di situasi bencana. Di samping itu, orang tua, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin seringkali jauh lebih rentan. Informasi, pengaturan kelembagaan, dan sistem komunikasi peringatan harus diatur sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan setiap kelompok di dalam masyarakat yang rentan terhadap bahaya.

Sistem peringatan dini multi-ancaman menangani beberapa ancaman dan/atau dampak dari ancaman, baik yang serupa maupun berbeda jenis, dimana kejadian bahaya dapat terjadi secara tunggal, secara bersamaan/simultan, secara bertahap, maupun secara kumulatif. Sistem ini juga memperhitungkan potensi dampak yang saling terkait satu sama lain. Suatu sistem peringatan dini multi-ancaman yang mampu memberi peringatan terhadap satu atau lebih ancaman akan meningkatkan efisiensi dan konsistensi peringatan, melalui mekanisme dan kapasitas yang terkoordinasi dan kompatibel, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk identifikasi ancaman dan pemantauan beragam ancaman yang akurat dan selalu diperbarui.



Gambar 3.2. Ringkasan Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Bencana

4

PRBBK YANG INKLUSIF

4.1. GENDER DAN INKLUSI SOSIAL DALAM PRBBK

Di Indonesia, terdapat 2.952 kejadian bencana yang tercatat sepanjang sepanjang tahun 2020. Banyaknya bencana ini pun merupakan ancaman yang berasosiasi dengan cuaca ekstrem, atau ancaman hidrometeorologi yang dipicu krisis iklim.¹⁷ Bencana yang disebabkan oleh perubahan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap desa rawan bencana, yang dihuni oleh 33% dari total populasi Indonesia.¹⁸ Sebagai contoh, desa pesisir, di mana masyarakat pesisir yang 85% sumber penghasilan utamanya tergantung pada komoditas kelautan akan terancam kehilangan sumber penghidupannya. Secara khusus, perempuan dan kelompok rentan lainnya mengalami dampak yang tidak proporsional dari bencana, terutama karena akses yang tidak setara terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, pengarusutamaan gender diperlukan dalam setiap tahapan pengelolaan risiko bencana untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan lainnya. Kegagalan melihat isu bencana dengan lensa gender akan meningkatkan kerentanan perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Ketahanan diartikan sebagai: “Kemampuan sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang terpapar *hazard* untuk melawan, menyerap, mengakomodasi dan memulihkan diri dari dampak suatu bahaya secara cepat dan efisien, termasuk melestarikan dan memulihkan struktur dan fungsi dasar yang penting.”¹⁹ Menanggapi hal itu, penting untuk mempersiapkan masyarakat dalam usaha peningkatan resiliensi/ketahanan terhadap resiko bencana. Dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 - 2030, sebagai kelanjutan dari Kerangka Rencana Aksi Hyogo, prioritas untuk membangun ketahanan berbasis masyarakat menjadi semakin penting.

Dalam perkembangannya, paradigma mekanisme pengurangan risiko bencana (PRB) telah berubah dengan menekankan pada pentingnya peran komunitas dengan *Community-Based Disaster Risk Management* (CBDRM) atau Penanggulangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Pada PRBBK ini, masyarakat berisiko bencana merupakan aktor aktif

¹⁷ Pusdatinmas-BNPB. 2020

¹⁸ Inarisk-BNPB.

¹⁹ UNDRR. [“Understanding Disaster Risk.”](#)

dalam PRB. Indonesia juga telah mengembangkan berbagai macam jenis PRBBK seperti Destana, Desa Desi, Desa Proklim, Kampung Siaga Bencana, dan lainnya. Paling tidak terdapat delapan program PRBBK yang ada di Indonesia, masing-masing dengan kementerian/lembaga yang berbeda yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Namun, hingga saat ini belum terdapat instrumen hukum yang memberikan standar pelaksanaan program berkaitan dengan pembangunan ketangguhan berbasis desa/kelurahan/komunitas di Indonesia, maupun mendaulatkan harmonisasi antara program-program ini. Menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mengintegrasikan gender dan secara bersamaan melakukan harmonisasi kebijakan antara seluruh kementerian/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan *community-based disaster risk management*.

Walaupun komunitas merupakan aktor aktif dalam konsep PRBBK, tanpa mengadopsi perspektif gender, perempuan tidak dapat mendapatkan manfaat sepenuhnya dari program-program yang aktif mengembangkan konsep PRBBK. Hambatan norma sosial dan relasi intra-rumah tangga menghambat perempuan dalam partisipasi yang bermakna dalam program PRBBK. Hal ini merupakan isu penting dan tidak dapat dipisahkan dari isu-isu lainnya, seperti pola peningkatan kejadian ancaman dan risiko perubahan iklim, problema ketahanan ekonomi atau aset penghidupan dan pangan masyarakat, dan lemahnya perlindungan sosial dan inklusivitas, tidak lain karena aspek gender merupakan aspek yang memberatkan kerentanan perempuan dalam usaha ketangguhan terhadap bencana.

Dalam penanggulangan bencana perempuan harus dipandang sebagai aktor, informan, dan terpenting adalah sebagai pemegang hak. Perempuan sebagai aktor dalam hal ini berarti bahwa menyadari perempuan memiliki persentase yang besar dalam populasi di Indonesia, dan oleh sebab itu harus diperhitungkan dalam kebijakan pencegahan, pengurangan risiko, dan terhadapnya dilakukan pemberdayaan yang membuatnya bisa berperan aktif dalam perencanaan, kesiapsiagaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta monitoring.

Perempuan sebagai informan dalam hal ini berarti perempuan sebagai pemegang pengetahuan dan informasi mengenai tempat di mana dia tinggal dan memiliki pengalaman yang berbeda dari laki-laki, dan oleh sebab itu pandangannya membuat gambaran terhadap penanggulangan bencana menjadi holistik. Perempuan sebagai pemegang hak, berarti partisipasi perempuan dalam penanggulangan bencana adalah

pemenuhan dan perlindungan terhadap hak perempuan terutama dari bentuk-bentuk diskriminasi berbasiskan identitas gender.²⁰

Tiga penyebab utama risiko yang lebih tinggi bagi perempuan dan kelompok rentan dalam bencana: **pertama**, status sosial ekonomi yang cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki yang membentuk kerentanan yang berbeda dalam menghadapi bencana; **kedua**, akses perempuan terhadap informasi kebencanaan di Indonesia masih terbatas, termasuk pendidikan kebencanaan yang dapat mengurangi risiko individu; dan **ketiga**, rendahnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan formal terkait penanggulangan bencana.

a. Status Sosial

Keadaan sosio-ekonomi perempuan mempengaruhi ketanggapan dan kemampuan mereka untuk pulih dalam menghadapi dampak bencana.²¹ Kondisi sosio-ekonomi yang telah ada sebelum bencana ini yang dapat memperparah ketidaksetaraan gender saat dan pasca bencana. Dari sisi partisipasi angkatan kerja, persentase perempuan sebesar 51,88% jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 82,69%.²² Selain itu, perempuan memiliki kecenderungan untuk bekerja dalam sektor informal (61,8% dari perempuan bekerja di sektor informal) dan sektor berpenghasilan rendah dan rentan akan adanya guncangan sosial ekonomi, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan (26,62%), perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (23,71%), dan industri pengolahan (16,45%). Kerentanan ini terkadang menjadi lebih kuat bila bersinggungan dengan bentuk kerentanan lain, kelompok-kelompok yang perlu diperhatikan adalah, dan tidak terbatas pada, perempuan dengan disabilitas, perempuan kepala rumah tangga, perempuan masyarakat hukum adat, dan perempuan minoritas.

Dalam tahap pasca bencana, dampak yang tidak proporsional juga dialami oleh perempuan karena keadaan sosio-ekonominya. Dalam hal pemulihan ekonomi, perempuan dan penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang cenderung sukar pulih secara ekonomi setelah terjadinya bencana. Kondisi sosial dan kemiskinan membuat perempuan lebih rentan terhadap dampak bencana. Tingkat kemiskinan perempuan di Indonesia lebih tinggi daripada laki-laki, dan kepemilikan aset berharga seperti tanah dan rumah sebagian besar dimiliki oleh laki-laki, yang

²⁰ OSCE. 2009. [Gender and Early Warning System: An Introduction](#)

²¹ UNDP. 2010. [Gender and Disasters](#)

²² Badan Pusat Statistik. 2019. [Profil Perempuan Indonesia](#).

mengakibatkan kapasitas perempuan terhadap aset ekonomi sangat rendah. Di Indonesia, keterwakilan perempuan di sektor pekerjaan informal dan pekerjaan berupah rendah, selain itu, perempuan berpenghasilan 23% lebih rendah daripada laki-laki.²³ Mereka juga menghadapi diskriminasi dalam mengakses modal, bahan mentah dan tanah, yang membatasi mereka pada peluang menghasilkan pendapatan mereka. Setelah terjadi bencana, perempuan kehilangan semua sumber mata pencaharian mereka karena kerusakan tempat kerja mereka. Dalam bencana, perempuan lebih cenderung melepaskan aset mereka untuk menerima uang tunai guna memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Sebagai akibat dari guncangan atau bencana, ketika pendapatan rumah tangga terbatas, perempuan juga lebih cenderung memprioritaskan anggota keluarga lainnya untuk makanan dan kesehatan, yang berdampak negatif pada kesehatan dan gizi mereka sendiri.²⁴ Semua faktor ini berkontribusi pada rendahnya kapasitas mereka untuk mempertahankan atau mengakses sumber mata pencaharian baru ketika sumber mata pencaharian mereka yang sudah terganggu oleh banjir.²⁵ Contohnya, mayoritas perempuan di kota Palu mencari nafkah sebagai pedagang warung untuk menunjang pendapatan keluarga. Dengan adanya gempa bumi, semua warung yang mereka miliki hancur dan menghilangkan sumber pendapatan terbesar mereka.

b. Akses Terhadap Informasi Kebencanaan

Secara umum, akses perempuan terhadap informasi kebencanaan di Indonesia sangatlah terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh berjalannya peran stereotipikal laki-laki untuk menghadiri rapat dan mengikuti aktivitas di komunitas, yang membuat laki-laki mendapatkan informasi pertama mengenai kebencanaan. Norma gender dan stereotip gender yang melingkupi tempat di mana mereka hidup menjadi penghambat bagi perempuan untuk mengakses informasi yang dibutuhkannya dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini, peran stereotipikal laki-laki untuk menghadiri rapat sebagai wakil keluarga membuat laki-laki cenderung mendapatkan informasi pertama mengenai penanggulangan bencana. Dengan tidak adanya mekanisme yang memastikan bahwa rantai informasi tersebut sampai kepada warga perempuan, kesiapan perempuan dalam menghadapi bencana menjadi tidak optimal. Fakta ini tercermin pada hasil *Forum Group Discussion* OXFAM di Palu yang mana, dibandingkan laki-laki, perempuan tidak mengetahui informasi apapun mengenai

²³ International Labour Organization. 2020. [Statistics: Gender Pay Gaps in Indonesia.](#)

²⁴ World Bank. 2020. [Indonesia Country Gender Assessment: Investing in Opportunities for Women](#)

²⁵ Ajibade. 2013. [Urban flooding in Lagos, Nigeria: Patterns of vulnerability and resilience among women](#)

kebencanaan termasuk mengenai cara mengakses informasi BMKG.²⁶ Selain itu, sebuah laporan oleh CARE yang dilakukan di Sulawesi Tengah juga menunjukkan bahwa laki-laki berperan dalam berpartisipasi di pertemuan masyarakat atau publik, dan seringkali menjadi sumber informasi yang diterima keluarga mereka, sehingga akses perempuan terhadap informasi kebencanaan yang ada di dalam desanya semakin terbatas.²⁷

c. Peran dalam Pengambilan Keputusan

Peran perempuan dalam pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana masih sangat rendah tak hanya di tingkat komunitas, tetapi juga di tingkat institusi. Selain itu, masih terdapat stereotip gender yang berlaku dalam pemilihan posisi perempuan. Meskipun persentase perempuan di beberapa institusi sudah cukup tinggi, tugas yang dibebankan terhadapnya sering kali merupakan tugas-tugas bersifat administratif.²⁸ Hal ini mempengaruhi formasi pegawai dalam beberapa institusi pemerintahan yang menangani persoalan teknis, seperti BPBD, Dinas PU, BWS.²⁹ Dominasi laki-laki dalam proses ini membuat kecenderungan bias gender dalam perancangan dan sistem penanggulangan bencana. Sebagai contoh, pandangan bahwa *early warning system* adalah sistem yang netral gender merupakan pandangan umum, yang menyebabkan risiko desain *early warning system* yang tidak memperhatikan pola komunikasi dan interaksi perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Pada tahun 2021, data yang dikumpulkan di 144 desa di Lembata menemukan bahwa hanya satu perempuan yang menjadi kepala desa dan sedikit atau tidak ada keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan selama bencana. Namun, perlu dicatat bahwa LSM di Lembata memiliki tingkat partisipasi perempuan yang tinggi. Di 79 Desa Tangguh Bencana di Lembata, pengelolaannya terdiri dari 30-40% perempuan.³⁰ Hal ini juga terjadi di Palu, di mana dua dari pemimpin huntara adalah perempuan.³¹ Meskipun ini menunjukkan adanya perkembangan progresif terhadap kepemimpinan perempuan di kebencanaan, masih terdapat ketimpangan keterwakilan antara laki-laki dan perempuan di daerah-daerah terpencil.

²⁶ OXFAM. 2018. Laporan Hasil Kaji Cepat Gender dalam Bencana Sulawesi Tengah.

²⁷ CARE Rapid Gender Analysis in UN Women. 2018. [Gender and Inclusion Alert: Central Sulawesi Earthquake and Tsunami](#).

²⁸ World Bank. 2021. *The National Urban Flood Resilience Program: Preliminary Findings on Gender Equality and Social Inclusion Issues for Urban Flood Resilience*.

²⁹ World Bank. 2021. *The National Urban Flood Resilience Program: Preliminary Findings on Gender Equality and Social Inclusion Issues for Urban Flood Resilience*.

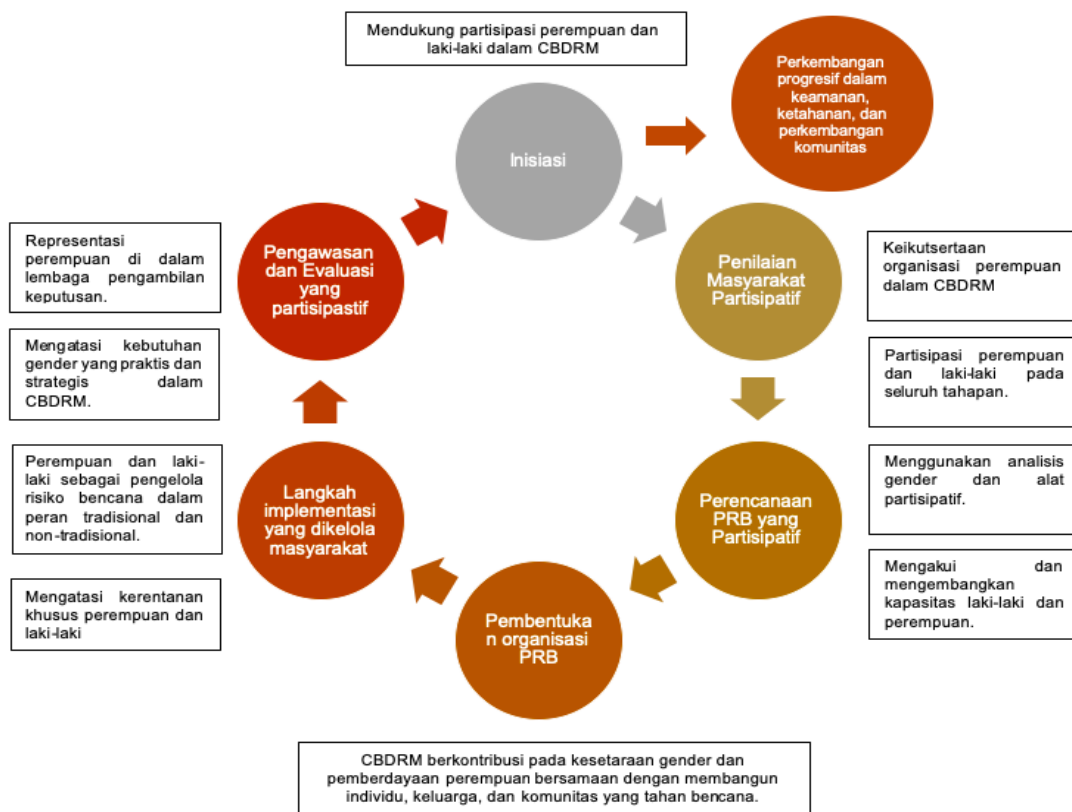
³⁰ Perkumpulan Pikul, Studi Baseline Project Resilient Island di Kabupaten Lembata, Studi baseline ini dilakukan tahun 2016 pada 6 desa di Kabupaten Lembata, untuk Project ini didanai oleh Plan Indonesia

³¹ OXFAM. 2018. Laporan Hasil Kaji Cepat Gender dalam Bencana Sulawesi Tengah.

4.2. PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PRBBK

Berbeda dari mekanisme PRB tradisional, PRBBK melibatkan kegiatan, tindakan, proyek, dan program untuk mengurangi risiko bencana yang dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat yang tinggal di komunitas berisiko dengan tujuan membangun masyarakat yang aman, layak huni, tahan bencana, dan maju. Komunitas dan kelompok rentan adalah aktor aktif dalam PRB ini sementara pemerintah, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya mengambil peran yang fasilitatif dan suportif.³²

Unsur PRBBK yang Inklusif Gender³³



Gambar 4.1. Skema PRBBK yang inklusi gender

Namun, PRBBK yang tidak mempertimbangkan aspek gender tidak mampu mengakomodasi kepentingan perempuan yang berbeda. Oleh sebab itu pengarusutamaan gender perlu dilakukan dalam setiap proses dan tahapan PRBBK.³⁴ Perbedaan antara

³² *Ibid.*

³³ SARPN. [Integrating Gender into Community Based Disaster Risk Management](#)

³⁴ Tipologi Intervensi Gender

PRB tradisional dan PRBBK yang inklusif gender dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:³⁵

Tabel 2.7. PRBBK tradisional dan PRBBK yang inklusi gender.

Pendekatan Tradisional	PRBBK yang Inklusif Gender
Bencana tidak bisa dicegah	Bencana dapat dicegah. Kita dapat bersiap untuk menghindari dan mengurangi kerusakan dan kehilangan.
Prioritas pada tanggap darurat dan rehabilitasi	Prioritas pada tahap pra-bencana yaitu dalam pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan
<p>Penyintas bencana adalah korban yang tidak berdaya dan penerima pasif</p> <p>Perempuan sebagai korban bencana dan salah satu kelompok yang paling rentan dalam situasi bencana. Tidak ada pengakuan atas pengetahuan, keterampilan, dan kontribusi perempuan dalam manajemen risiko bencana</p> <p>Orang dewasa mewakili anak-anak dalam menangani kebutuhan anak</p>	<p>Penyintas bencana adalah aktor aktif dalam mengurangi kerentanannya, dalam respon keadaan darurat dan dalam membangun kembali kehidupan dan mata pencaharian mereka</p> <p>Kapasitas masyarakat yang ada digunakan dan diperkuat untuk mengurangi risiko dan kerentanan bencana</p> <p>Mengatasi kerentanan perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dan mengakui kapasitas perempuan sebagai dasar bagi keterlibatan perempuan yang berarti dalam PRBBK</p> <p>Suara anak-anak diperhatikan dan dipertimbangkan.</p>
PRB adalah tanggung jawab utama badan penanggulangan bencana dan ahli seperti, ekonomis, pekerja sosial, pemerintah, dan LSM	<p>Pengakuan akan pentingnya partisipasi masyarakat. Manajemen risiko bencana adalah tanggung jawab semua orang.</p> <p>Menekankan pada pembangunan kapasitas di tingkat nasional, lokal & masyarakat untuk sistem manajemen bencana yang terintegrasi, multi-stakeholder dan responsif.</p>
Fokus pada bantuan fisik dan material serta solusi teknis	Meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditujukan untuk mengurangi kerentanan
Fokus pada rumah tangga individu	<p>Fokus terhadap pengurangan risiko bencana individu, keluarga, dan komunitas</p> <p>Dikaitkan dengan pengembangan masyarakat.</p>

1. *Gender-Discriminatory/Gender-Blind*: Mengabaikan isu gender, peran gender dan kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan; mungkin berisi tindakan yang mendiskriminasi perempuan dan laki-laki, dan/atau memperkuat ketidaksetaraan gender.
2. *Gender-Neutral*: Mengakui ketidaksetaraan gender, tetapi tidak memasukkan langkah-langkah khusus untuk mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan gender.
3. *Gender-sensitive/transformative*: Mengakui kebutuhan dan prioritas khusus perempuan dan laki-laki, dan secara sengaja dan proaktif menangani ketidaksetaraan gender dengan mempertanyakan dan menantang struktur, institusi dan norma-norma yang menjadi dasar ketidaksetaraan ini, dipertahankan, diperkuat dan direproduksi dari waktu ke waktu

FAO. [An Introduction to Key Gender Terms and Concepts](#)

³⁵ SARPN. [Integrating Gender into Community Based Disaster Risk Management](#)

<p>Donor (orang luar) memutuskan apa yang dibutuhkan keluarga dan masyarakat.</p>	<p>Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk memprioritaskan kebutuhan dan solusi pengurangan risiko.</p> <p>Intervensi dan kegiatan manajemen risiko bencana yang peka terhadap gender</p>
<p>Tujuan penanggulangan bencana adalah untuk mengurangi penderitaan segera dan memenuhi kebutuhan darurat.</p> <p>Tujuannya agar keadaan kembali normal.</p>	<p>Tujuan PRBBK adalah untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan meningkatkan kapasitas untuk lebih siap dan mengatasi bencana.</p> <p>Perspektif gender dalam PRBBK berkontribusi pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.</p> <p>Tujuannya adalah membangun keluarga, komunitas, dan masyarakat yang aman, tahan bencana dan berkembang.</p>

Cara untuk mengintegrasikan gender dalam PRBBK adalah sebagai berikut:³⁶

1. Pendekatan komprehensif dalam pengarusutamaan gender di PRBBK

Prinsip-prinsip kesetaraan gender dan pengurangan risiko harus diintegrasikan dalam semua aspek bencana, baik pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana yang bertujuan untuk:

- a. Memberikan tanggapan dengan cara yang memberdayakan perempuan dan komunitas lokal
- b. membangun kembali dengan cara mengatasi akar penyebab kerentanan, termasuk ketidaksetaraan gender dan sosial
- c. menciptakan peluang yang bermakna bagi partisipasi dan kepemimpinan perempuan
- d. melibatkan sepenuhnya perempuan lokal dalam proyek-proyek mitigasi bahaya dan penilaian kerentanan
- e. memastikan bahwa perempuan mendapat manfaat dari program pemulihan ekonomi dan dukungan pendapatan, misalnya akses, upah yang adil, pelatihan keterampilan nontradisional, penitipan anak, dan bantuan sosial.
- f. memberikan prioritas pada layanan sosial, sistem dukungan anak-anak, pusat perempuan, ruang ramah perempuan di hunian sementara dan ruang aman lainnya.

³⁶ Elaine Enarson.2005. [Gender equality in disasters: Six principles for engendered relief and reconstruction](#)

- g. mengambil langkah-langkah praktis untuk memberdayakan perempuan, antara lain: melakukan konsultasi sepenuhnya dengan perempuan untuk disain dan operasi hunian sementara, mempersiapkan rumah baru atas nama laki-laki dan perempuan, mempromosikan hak atas tanah untuk perempuan, menyediakan lapangan pekerjaan untuk perempuan, dan memberikan alokasi anggaran untuk kelompok perempuan yang bertujuan untuk mengawasi proyek rehabilitasi bencana.
2. Mencari fakta, penting untuk mengarahkan bantuan dan merencanakan pemulihan yang penuh dan adil. Tidak ada penanggulangan bencana yang "netral gender".³⁷
 - a. Mengumpulkan dan meminta data spesifik gender
 - b. Melatih dan mempekerjakan perempuan berdasarkan penilaian berbasis masyarakat dan penelitian lanjutan
 - c. Memanfaatkan pengetahuan perempuan tentang sumber daya lingkungan dan kompleksitas masyarakat
 - d. Mengidentifikasi dan menilai kebutuhan spesifik jenis kelamin, mis. untuk pekerja perempuan berbasis rumahan, kesehatan mental laki-laki, perempuan terlantar dan bermigrasi vs. laki-laki
 - e. Melacak (eksplisit/implisit) penganggaran gender untuk dana bantuan dan tanggapan
 - f. Melacak distribusi barang, jasa, peluang bagi perempuan dan laki-laki
 - g. Menilai dampak jangka pendek dan jangka panjang pada perempuan/laki-laki dari semua inisiatif bencana
 - h. Memantau perubahan dari waktu ke waktu dan dalam konteks yang berbeda.
3. Bekerjasama dengan kelompok perempuan di akar rumput (*grassroots*). Organisasi masyarakat perempuan memiliki wawasan, informasi, pengalaman, jaringan, dan sumber daya yang vital untuk meningkatkan ketahanan bencana. Bekerja dengan dan mengembangkan kapasitas kelompok perempuan yang ada seperti:³⁸
 - a. Kelompok perempuan yang berpengalaman dalam bencana
 - b. Organisasi perempuan dan LSM perempuan dan pembangunan; kelompok aksi lingkungan perempuan
 - c. Kelompok advokasi dengan fokus pada anak perempuan dan perempuan, mis. aktivis perdamaian

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

- d. Kelompok lingkungan perempuan
 - e. Organisasi berbasis agama dan layanan
 - f. Perempuan profesional, misalnya pendidik, ilmuwan, manajer darurat
4. Menolak Stereotip. Mendasarkan semua Inisiatif pada pengetahuan tentang perbedaan dan konteks budaya, ekonomi, politik, dan seksual tertentu, bukan pada generalisasi yang salah:³⁹
- a. Perempuan yang selamat adalah responden pertama dan pembangun kembali yang vital, bukan korban pasif
 - b. Ibu, nenek, dan perempuan lain sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pemulihan anak-anak, tetapi kebutuhan perempuan mungkin berbeda dari kebutuhan anak-anak
 - c. Tidak semua perempuan adalah ibu atau tinggal bersama laki-laki
 - d. Rumah tangga yang dipimpin perempuan belum tentu yang termiskin atau paling rentan
 - e. Perempuan bukanlah tanggungan ekonomi tetapi produsen, pekerja masyarakat, pencari nafkah
 - f. Norma gender menempatkan anak laki-laki dan laki-laki dalam risiko juga, mis. kesehatan mental, pengambilan risiko, kecelakaan
 - g. Menargetkan perempuan untuk layanan tidak selalu efektif atau diinginkan tetapi dapat menghasilkan reaksi atau kekerasan
 - h. Perempuan yang terpinggirkan (misalnya tidak berdokumen, HIV/AIDS, kasta rendah, pribumi, pekerja seks) memiliki perspektif dan kapasitas yang unik
 - i. Tidak ada "satu ukuran" yang cocok untuk semua: kebutuhan dan keinginan khusus budaya harus dihormati, mis. praktik keagamaan tradisional perempuan
 - j. Pakaian, kebersihan pribadi, norma privasi
5. Mengambil Pendekatan Hak Asasi Manusia. Inisiatif secara demokratis dan partisipatif dalam melayani perempuan dan anak perempuan dengan baik. Perempuan dan laki-laki sama-sama harus diyakinkan pada kondisi kehidupan yang dibutuhkan untuk menikmati hak asasi manusia mereka yang mendasar, serta untuk bertahan hidup. Anak perempuan dan perempuan dalam krisis memiliki peningkatan risiko:⁴⁰
- a. Pelecehan seksual dan pemerkosaan, pelecehan oleh pasangan intim, mis. di bulan dan tahun setelah bencana besar

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

- b. Eksploitasi oleh pedagang, misalnya menjadi pekerjaan rumah tangga, pertanian dan seks
 - c. Erosi atau hilangnya hak atas tanah yang ada
 - d. Pernikahan dini/paksa
 - e. Migrasi paksa
 - f. Berkurangnya atau kehilangan akses ke pelayanan perawatan kesehatan reproduksi
 - g. Kontrol laki-laki atas sumber daya pemulihan ekonomi
6. Menghormati dan mengembangkan kapasitas perempuan. Hindari membebani perempuan dengan beban kerja yang sudah berat dan tanggung jawab keluarga yang cenderung meningkat.⁴¹
- a. Mengidentifikasi dan mendukung kontribusi perempuan untuk sistem peringatan dini informal, kesiapsiagaan sekolah dan rumah, solidaritas masyarakat,
 - b. Pemulihan sosial-emosional, perawatan keluarga besar
 - c. Mengkompensasi waktu, energi, dan keterampilan akar rumput secara material
 - d. Perempuan yang mampu dan mau bermitra dengan organisasi kebencanaan
 - e. Menyediakan perawatan anak, transportasi dan dukungan lain yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi penuh dan setara perempuan dalam merencanakan masa depan yang lebih tahan bencana

Hasil Temuan Program Proteksi Sosial yang Responsif Gender⁴²

UNICEF, UNDP, dan UN Women melakukan dua studi yaitu mekanisme pengawasan, evaluasi, dan penargetan dan uji coba program padat karya. Terdapat empat temuan utama:

- Program perlindungan sosial berbasis desa berkontribusi secara signifikan untuk mereduksi dampak lonjakan ekonomi terhadap rumah tangga, dengan dukungan penargetan komunitas.
- Kelompok rentan menjadi salah satu target prioritas dari BLT-DD tetapi hanya terdapat sedikit bukti mengenai partisipasi aktif dari kelompok tersebut pada pengambilan keputusan mengenai program di tingkat desa. Kerangka hukum untuk mendukung partisipasi pada tingkat ini sangat penting.
- Perempuan memiliki peran penting untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan uang dari BLT-DD sehingga untuk menjamin implementasi yang sistematis dari proteksi sosial yang responsif gender, beberapa rekomendasi adalah:
 - i) meningkatkan penargetan dengan fokus terhadap penerima manfaat perempuan,

⁴¹ Ibid.

⁴² United Nations.2021. [JOINT SDG FUND FOR ADAPTIVE SOCIAL PROTECTION & COVID-19 MULTI-PARTNER TRUST FUND \(MPTF\)](#).

- ii) mengidentifikasi hambatan gender yang dapat berpotensi mencegah perempuan mengakses manfaat, dan iii) desain program pemberdayaan perempuan.
- Memastikan program proteksi sosial melampaui penargetan dengan memastikan program berdampak pada kesetaraan gender.

4.3. KELOMPOK LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PRBBK

Berdasarkan data yang ada, 9, 78% penduduk Indonesia adalah lansia (BPS, 2020) dan 14,2 % (30,38 juta) disabilitas (Susenas, 2018). Angka tersebut menunjukkan betapa banyaknya lansia dan penyandang disabilitas di Indonesia serta menunjukkan signifikansi pelibatan mereka dalam setiap usaha untuk pengurangan risiko bencana yang ada. Namun demikian, lansia dan penyandang disabilitas masih menjadi kelompok yang banyak termarginalkan dan tertinggal dalam hal pengurangan risiko bencana dalam hal pelibatan. Stigma mengenai mereka sebagai kelompok rentan yang tidak berdaya menyebabkan keterlibatan mereka dalam usaha-usaha pengurangan risiko hanya sebatas sebagai 'obyek'. Mereka sudah sangat dipertimbangkan dalam sebagai penerima manfaat. Pemerintah dan pemberi layanan kemanusiaan lainnya juga sudah memprioritaskan mereka dalam pemberian layanan dan bantuan. Namun hal tersebut belum cukup karena mereka seharusnya memiliki hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk bisa mendapatkan akses akan pelibatan aktifnya.

Dalam hal PRBBK, setiap anggota masyarakat sebaiknya memiliki hak yang sama untuk ikut terlibat secara bermakna dan juga berkontribusi secara aktif dalam setiap aspek dan kegiatan pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat. Hal ini sejalan dengan beberapa payung hukum yang sudah tersedia di Indonesia seperti:

- Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat adalah perlindungan terhadap kelompok rentan
- UU no.8 Tahun 2016 Pasal 20 Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas

- UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,

Hambatan yang ditemui

Secara garis besar, berikut adalah hambatan-hambatan yang ditemui oleh kelompok lansia dan penyandang disabilitas dalam situasi ancaman dan bencana:

1. Kurang memadainya kebijakan yang ada

Kebijakan yang ada masih belum memadai dalam memastikan pelibatan secara bermakna dari kelompok lansia dan penyandang disabilitas. Meskipun beberapa aspek sudah dimasukkan ke dalam beberapa peraturan baik di tingkat nasional maupun di beberapa daerah, namun pelaksanaannya masih belum maksimal dan mengalami banyak sekali kendala yang ada. Selain itu, kebijakan yang ada masih memfokuskan lansia dan penyandang disabilitas sebagai penerima bantuan dan layanan.

2. Stigma dan sikap negative

Rasa kasihan, melihat mereka sebagai kelompok yang tidak berdaya, tidak bisa produktif, harus dibantu, dsb merupakan sikap negative yang menghambat pelibatan aktif kelompok lansia dan penyandang disabilitas. Sikap ini muncul bukan hanya dari pemangku kepentingan dan pengambil keputusan dalam negara dan masyarakat, namun dari orang-orang sekitar mereka sendiripun masih banyak stigma dan sikap negative yang muncul.

3. Kurangnya pelibatan

Dengan kurangnya kebijakan dan munculnya stigma dan sikap negative, maka kesempatan mereka untuk bisa terlibat secara bermakna masih sangat kurang. Pelibatan bermakna disini dimaksudkan bahwa mereka

4. Kurangnya fasilitas dan layanan

Layanan yang ada seringkali masih belum memperhatikan kebutuhan khusus dari lansia dan penyandang disabilitas. Jika ada, biasanya jumlahnya sangat terbatas dan masih belum memenuhi kebutuhan semua lansia dan penyandang disabilitas yang ada. Layanan khusus tersebut seperti alat bantu mobilitas, kebutuhan makanan yang khusus, kebutuhan Kesehatan dan kebutuhan sosial lainnya.

Inklusifitas untuk memenuhi hak Lansia dan Penyandang Disabilitas dalam Humanitarian Inclusion Standard untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas⁴³, ada 9 standar kunci yang bisa dijadikan acuan untuk memastikan kebutuhan, kapasitas dan hak-hak orang lanjut usia dan penyandang disabilitas dapat terpenuhi, 9 standar kunci tersebut adalah:

1. **Identifikasi:** Lansia dan penyandang disabilitas diidentifikasi untuk memastikan mereka dapat mengakses bantuan dan perlindungan kemanusiaan yang partisipatif, tepat dan relevan dengan kebutuhan mereka.
2. **Akses yang Aman dan Adil:** Lansia dan penyandang disabilitas memiliki keamanan dan akses yang adil terhadap bantuan kemanusiaan.
3. **Ketahanan:** Lansia dan penyandang disabilitas tidak terpengaruh secara negatif, lebih siap, tangguh, dan berkurang risikonya sebagai akibat dari tindakan kemanusiaan.
4. **Pengetahuan dan partisipasi:** Lansia dan penyandang disabilitas mengetahui hak-hak mereka, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
5. **Umpan balik dan keluhan:** Orang tua dan penyandang disabilitas memiliki akses untuk mekanisme umpan balik dan keluhan yang aman dan responsive
6. **Koordinasi:** Orang tua dan penyandang disabilitas dapat mengakses dan berpartisipasi dalam bantuan kemanusiaan yang terkoordinasi dan saling melengkapi.
7. **Pembelajaran:** Organisasi mengumpulkan dan menerapkan pembelajaran untuk memberikan lebih banyak bantuan inklusif.
8. **Sumber daya manusia:** Staf dan relawan memiliki keterampilan yang sesuai dan sikap untuk melaksanakan aksi kemanusiaan yang inklusif, dan orang tua dan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk pekerjaan dan menjadi sukarelawan dalam organisasi kemanusiaan.
9. **Manajemen sumber daya:** Orang tua dan penyandang disabilitas dapat mengharapkan bahwa organisasi kemanusiaan mengelola sumber daya dengan cara yang mendorong inklusi.

Seringkali, memenuhi hak Lansia dan penyandang disabilitas menjadi standar bagi terpenuhinya kebutuhan kelompok rentan lainnya. Karena dengan memastikan

⁴³ Humanitarian Inclusion Standards for older people and people with disabilities adalah standar kemanusiaan yang dirancang untuk membantu mengatasi kesenjangan dalam memahami kebutuhan, kapasitas dan hak-hak orang lanjut usia dan penyandang disabilitas, dan mempromosikan inklusi mereka dalam aksi kemanusiaan. (<https://spherestandards.org/resources/humanitarian-inclusion-standards-for-older-people-and-people-with-disabilities/>)

inklusifitas bagi lansia dan penyandang disabilitas akan membuka akses juga bagi kelompok dengan hambatan lainnya seperti perempuan, anak, ibu hamil, dsb. Layanan yang inklusif akan dapat dinikmati oleh semua kelompok masyarakat yang ada.

PADUAN

PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK)

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Ajibade. 2013. [Urban flooding in Lagos, Nigeria: Patterns of vulnerability and resilience among women](#)
- Arnall et al., 2013 Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif (Adaptive Social Protection)
- Badan Pusat Statistik. 2019. [Profil Perempuan Indonesia.](#)
- Barnett, J. (2010). Adapting to climate change: three key challenges for research and policy-an editorial essay. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 1(3), 314-317.
- Bappenas. (2018). Kaji Ulang RAN API: Kajian Basis Ilmiah Proyeksi Iklim Atmosferik. Bappenas, Jakarta
- BAPPENAS 2021., Arah Kebijakan dan Kolaborasi Program Perlindungan Sosial Adaptif. Disampaikan dalam FGD Forum Konsultatif K/L Sinergitas Program Membangun Ketangguhan Bencana Berbasis Masyarakat. BNPB-SIAPSIAGA
- BNPB 2021. Hasil analisis database bencana Indonesia. Tanah longsor, Banjir, Putting Beliung, Kekeringan, dan Gelombang ekstrem secara berurutan yang paling sering terjadi di wilayah kepulauan Indonesia
- CARE Rapid Gender Analysis in UN Women. 2018. [Gender and Inclusion Alert: Central Sulawesi Earthquake and Tsunami.](#)
- Davies, M., Oswald, K., & Mitchell, T. 2009b. Climate Change adaptation, disaster risk reduction and social protection. OECD.
- Elaine Enarson.2005. [Gender equality in disasters: Six principles for engendered relief and reconstruction](#)
- FAO. [An Introduction to key gender terms and concepts](#)
- G. L. Bull et al. 2021. [Empowering Women: Send Social Assistance Payments Directly to Her.](#) World Bank. 5 March.
- HEART. 2020. [OPM Report Template version 5](#)

<https://covid19.go.id/artikel/2022/01/18/pemerintah-siapkan-rp451-triliun-untuk-program-pemulihan-ekonomi-nasional-2022>

International Labour Organization. 2020. [Statistics: Gender Pay Gaps in Indonesia.](#)

John Twig., 2015. *Good Practice Review 9: Disaster Risk Reduction, Chapter 9: Livelihood and DRR* & John Twig., 2009 *Character of Disaster Resilience Community*

Kantor Staf Presiden. 2021. [KSP Perkuat Peran Perempuan dalam Penanggulangan Bencana.](#)

KemenPPPA. 2020. Profil Perempuan Indonesia 2020.

M. Anggriani dan E. T. W. Mei. [Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Tangguh Bencana Mulyodadi Kabupaten Bantul.](#)

Mitchell, T.; Ibrahim, M.; Harris, K.; Hedger, M.; Polack, E.; Ahmed, A.; Hall, N.; Hawrylyshyn, K.; Nightingale, K.; Onyango, M.; Adow, M., and Sajjad Mohammed, S. (2010). *Climate Smart Disaster Risk Management, Strengthening Climate Resilience*, Brighton: IDS

MPBI, 2021. Laporan Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas XV, 2021.

OSCE. 2009. [Gender and Early Warning System: An Introduction](#)

OXFAM. 2018. Laporan Hasil Kaji Cepat Gender dalam Bencana Sulawesi Tengah.

Perkumpulan Pikul, Studi Baseline Project Resilient Island di Kabupaten Lembata, Studi baseline ini dilakukan tahun 2016 pada 6 desa di Kabupaten Lembata, untuk Project ini didanai oleh Plan Indonesia

Pasteur.K.,2011. *From Vulnerability to Resilience: A framework for analysis and action to build community resilience*

SARPN. [Integrating Gender into Community Based Disaster Risk Management](#)

The SMERU Research Institute. [Is Conditionality Pro-Women? A Case Study of Conditional Cash Transfer in Indonesia | The SMERU Research Institute](#)

UNDP. 2010. [Gender and Disasters](#)

UNDP. Integrating Gender Into Community Based Disaster Risk Management: Training Manual

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), "2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction", Geneva, May 2009 (<http://www.unisdr.org/we/inform/terminology>).

United Nations. 2021. [JOINT SDG FUND FOR ADAPTIVE SOCIAL PROTECTION & COVID-19 MULTI-PARTNER TRUST FUND \(MPTF\)](#).

UU No.6/2014 tentang Desa mengatur kewenangan desa dalam merumuskan pembangunan diwilayahnya

World Bank. 2020. [Adaptive Social Protection](#).

World Bank. 2020. [Indonesia Country Gender Assessment: Investing in Opportunities for Women](#)

World Bank. 2021. *The National Urban Flood Resilience Program: Preliminary Findings on Gender Equality and Social Inclusion Issues for Urban Flood Resilience.*